



Media Mahasiswa

WASHILAH

Untuk Peningkatan Perilaku Islami Penggalakan Kualitas Ilmiah, dan Pembobotan Idealisme

Tabloid Edisi 124

SE 3652 Cederai Konstitusi

Hal. 4 | Jalan Panjang Kampus Peradaban

Hal. 9 | Semerbak Isu Kekerasan Seksual
di Kampus Responsif Gender



Washilah_Uinam



www.washilah.com

TIBA-TIBA



Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Informasi Mahasiswa Alauddin (LIMA) Periode 2024. | Foto: Nurfadia (Magang).

Dalam hidup, tiba-tiba kadangkala menjadi hal yang paling menakutkan. Misalnya, tiba-tiba seorang penguasa menetapkan sebuah regulasi tak masuk akal atau bahkan tiba-tiba ketimpangan kian meroket tapi tak ada hilal penyelesaian. Meskipun begitu, walau serba tiba-tiba tanpa aba-aba, kami tak ingin abai.

Pram pernah bilang dalam bukunya yang berjudul Anak Semua Bangsa, “Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari.” Berkaca dari coretan Pram, kami menghadirkan Tabloid Edisi 124 dalam mengupayakan kerja-kerja kekal nan abadi itu.

Pada beberapa bagian dalam tabloid ini, kami menyajikan persoalan bagaimana taji Unit Layanan Terpadu (ULT) Kekerasan Seksual (KS) dalam menangani kekerasan seksual, problematika Surat Edaran (SE)

2591—yang kemudian berganti nama menjadi SE 3652—yang dikeluarkan pihak birokrasi dinilai tidak punya kekuatan hukum jelas tetapi justru dipakai untuk menghukum, hingga kelanjutan wacana-wacana pembangunan di UIN Alauddin Makassar.

Tiada rapalan mantra abracadabra yang kami gumamkan sehingga tiba-tiba tabloid ini tuntas begitu saja. Cobaan demi cobaan kian menggerogoti kami. Mulai dari rekan reporter yang raib berakibat pada molornya *timeline* penggarapan serta beberapa birokrasi yang menjadi narasumber enggan menumpahkan kata.

Bak sel kanker dengan metode penyembuhan kemoterapi, meski kecil harapannya, asa selalu ada. Tak apa kita lebam membiru kemudian remuk atau bahkan tak bersisa untuk hal yang disebut keadilan.

Tak luput, terima kasih yang tak terhingga untuk kawan reporter juga segala elemen-elemen penting yang ikut andil semasa

penggarapan tabloid edisi kali ini. Dengan partisipasi puluhan pasang tangan yang tangkas, tabloid ini kami rapalkan agar dengan tiba-tiba kesadaran kolektif mahasiswa kembali membara. Supaya tiba-tiba amarah yang sempat macet di kerongkongan akhirnya tumpah ruah.

Sebagaimana kata Pram, tulisan-tulisan ini akan abadi. Dan untuk solidaritas ataupun gerakan perlawanan pada birokrasi yang kini telah menjumpai mati, tak apa, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali.

Kepada para tuan dan puan, selamat membaca!

Tabloid yang hanya terdiri dari beberapa lembar ini mungkin akan memancing amarahmu, membuka pikiranmu atau bahkan dirimu tidak akan bereaksi sama sekali. Kemungkinan yang lain, relevansi tabloid ini di kemudian hari tidak ada lagi atau bahkan kejadian serupa akan terjadi lagi.

-TAJUK-

Siapa yang tidak takjub mendengar betapa heroiknya peranan mahasiswa mengebiri pemerintahan yang diktator di bawah rezim Orde Baru? Bak superhero dalam series anime Boku No Hero, mahasiswa seolah mampu membabat habis apapun yang dirasa tak sesuai dengan *quirk*—penamaan pada kekuatan para karakter superhero—yang mereka miliki.

Jika tuan dan puan ingin menyebut saya wibu, terserahlah, toh aksi-aksi heroik “superhero” melawan “penjahat” tak mungkin saya temui di kampus. Apalagi di UIN Alauddin. Sebab segala bentuk perlawanan kini menjumpai mati.

Bagaimana mungkin mahasiswa dikekang supaya tidak berdemonstrasi, sedangkan agen perubahan dan kontrol sosial adalah *quirk* mahasiswa itu sendiri? Langkah Hamdan ini mengingatkan saya pada salah satu tokoh dalam anime tadi, *All For One*—nama sang antagonis. Si bengis ini hebatnya bukan main. Ia mampu mencuri ataupun memberi seseorang *quirk*. Sebuah kemampuan maha kuasa. “Keabadian.”

Bahwa tuan dan puan merasa familiar dengan cerita ini, saya pun demikian. Jika *quirk* (kekuatan) adalah sebuah hak, maka perwujudan *All For One* dalam kehidupan nyata ialah Hamdan. Berbekal *quirk*-nya SE 2591 (sekarang SE 3652), ia dengan mudah mencabut *quirk* 31 mahasiswa. Mereka diskors lantaran demonstrasi. Padahal, demonstrasi ialah cara mahasiswa menyalurkan *quirk*-nya.

Barangkali Hamdan juga sepatok, bahwa mahasiswa dengan *quirk*-nya bisa bikin berabe. Jika keabadian Orde Baru saja dapat digilas habis, bagaimana mungkin Hamdan bisa tidur dengan tenang. Maka untuk membangun keabadiannya, ia butuh memperkokoh pengaruhnya. Sakti betul ia kini, walau telah dilaporkan dan dikecam oleh sejumlah pihak atas dugaan maladministrasi, Hamdan dan SE 3652 masih saja tak tergerus.

Namun yang Hamdan harus tahu, kekuasaan tidaklah abadi. Sebab kekuasaan punya ujungnya. Satu waktu dan mungkin sudah dekat, saya yakin akan lahir *quirk* baru, yang dalam anime tadi dikenal sebagai *One For All*. *Quirk* yang menjadi momok menakutkan bagi keabadian. Dalam implementasinya di kehidupan kampus, *All For One* yang saya maksud ialah kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa *quirk* untuk beraspikasi bukan hanya milik seorang, tapi milik semua mahasiswa. *Quirk* ataupun hak tersebut bukan hanya *one person* saja tetapi *for all*. *Quirk* kita ini memang hanya satu, walau begitu, *quirk* ini milik kita semua, *One For All*.



Diterbitkan sesuai SK Rektor UIN Alauddin Makassar No. 158 tahun 2024 | **Pelindung dan Penasehat:** Rektor UIN Alauddin Makassar | **Penanggung Jawab:** Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar | **Dewan Pembina:** Faisal Mustafa, Muhammad Fahrul Iras, Muhammad Aswan Syahrin, Arya Nur Prianugraha, M. Shoalihin, **Dewan Pakar:** Jushuatul Amriadi, Irham Sari, Astiti Nuryanti, Kardiman Aksah, Ismail HM, | **Pimpinan Umum:** Rahmat Rizki | **Sekretaris Umum:** Hilda Nurfaidah | **Bendahara Umum:** Malebbi Salsabila | **Direktur Pemberitaan:** Saldi Adrian | **Direktur Penelitian dan Pengembangan Organisasi:** Arya Asb | **Direktur Artistik:** A Muh Saleh | **Direktur Operasional:** Muhammad Iskar | **Direktur Media Sosial:** Ahmad Bilal | **Direktur Usaha:** Nur Fitri | **Redaktur Daring:** Sriwahyuni | **Redaktur Tabloid:** Nadhilla Putri Hasir | **Redaktur Foto:** Mahfud Al-Qadri | **Redaktur Penyiaran:** Rusmianti | **Redaktur Audio Visual:** Desviana | **Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM:** Muh Azhar S Putra | **Bidang Desain dan Layout:** Rahmat Hidayat | **Bidang Periklanan:** Dinda Lestari | **Reporter:** Hardiyanti, M Nur Fathun Na'im Syaiful, Amalia Waliffah, A Soesilo Ridwan, Nur Hastina, Fitria Alfaningsih, Siti Ulwiyah, Risnawati Suardi, Iqbal Mufid, Monica Ayu Lestari, Muhammad Yusrifar, Nur Rahma Hidayah, Aa Min Abduh, Ashabul Maimanah, Yuyun Wahyuni, Hulwana Ahsyani.

Maccarita!



Untuk produk jurnalistik yang lebih baik lagi, kami menyediakan ruang untuk suara pembaca. Kirim kritik dan saranmu dengan *scan barcode* ini.



Ilustrasi dan Layout: Andi Muh Saleh, Rahmat Hidayat

SE 3562 Cederai Konstitusi

Washilah - Aturan berubah, SE 2591 menjadi 3652. Namun rasa tetap sama: mencederai konstitusi.

Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2591 2024 pada 25 Juli lalu. Pada pokoknya menyoal kepada sivitas akademika untuk menyampaikan aspirasi.

Karena aturan tersebut, mahasiswa melakukan aksi protes. Mereka menganggap penyampaian aspirasi tidak seyogianya menyoal kepada pimpinan kampus.

Aksi protes digalakkan berulang kali. Namun alih-alih mengakomodir tuntutan mahasiswa, pihak kampus menanggapi dengan tangan besi.

Nama-nama pengurus lembaga kemahasiswaan yang terlibat dalam aksi protes dicatat dan dicap melanggar aturan, karena tidak menyampaikan izin sebelum melayangkan protes, sebagaimana yang tertera pada poin C dalam SE 2591. Puncaknya, 31 mahasiswa diskorsing.

Sejumlah pakar hukum menyebut SE itu melanggar konstitusi: mulai aktivis Hak Asasi manusia sekaligus eks Ketua KontraS Haris Azhar, Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bivitri Susanti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, hingga eks Dosen Universitas Indonesia Rocky Gerung.

Beberapa organisasi juga telah berpandangan demikian. Seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia.

Di tengah desakan itu, SE 2591 masih tetap bertengger. Seakan tak pelak dirundung kritik.

Alih-alih mencopot aturan itu, Hamdan Juhannis malah mengganti bungkusannya. Ia mengeluarkan SE 3652 1 Oktober lalu. Meski diklaim sebagai penyempurna SE 2591, tapi pokoknya tetap sama.

“Surat Edaran 3652 tahun 2024 sesungguhnya menyempurnakan SE 2591 secara administratif,” kata Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK), Kaswad Sartono, 15 November lalu.

SE itu mencantumkan 11 dasar hukum sebagai cantolannya. Salah duanya adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Di UU Nomor 9 Tahun 1988, memang menyinggung tentang syarat berdemostrasi. Sebagaimana yang tertera pada pasal 13.

Tapi di pasal itu, orang yang ingin melakukan demonstrasi hanya perlu menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak berwajib. Tak ada syarat mengantongi izin dahulu, seperti yang diatur dalam SE 3652 yang diklaim telah

disempurnakan.

Namun klaim penyempurnaan itu tidak berdasar. Sebab pada SE 3652, syarat “menyampaikan dan mendapat izin sebelum berdemostrasi,” masih tetap berlaku kepada mahasiswa.

Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Ian Hidayat menganggap SE 3652 tidak menggurkan permasalahan pokoknya. Yakni bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 terkait kebebasan menyampaikan aspirasi di depan publik.

“Tindakan rektor ini mencederai nilai konstitusi, terlebih demokrasi. SE 3652 juga tidak merubah apa-apa,” ucapnya, Selasa 10 Desember 2024.

Kini, meski SE 3652 menyebutkan bahwa aturan sebelumnya, SE 2591, tidak lagi berlaku. Namun skorsing terhadap 31 mahasiswa masih tetap berlaku.

Washilah telah berusaha mengkonfirmasi terkait hal ini secara langsung dan juga melalui media WhatsApp. Namun sampai berita ini terbit, Hamdan Juhannis belum juga menanggapi.

Statuta

Selain melanggar UUD 1945 sebagai konstitusi. Baik SE 2591 maupun SE 3652 tetap melanggar Statuta UIN Alauddin Makassar.

Itu diungkapkan Koordinator Kaukus untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Satria Unggul Wicaksana. Satria membetulkan bahwa

dalam statuta, rektor memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum internal. Namun produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan statuta.

Statuta merupakan anggaran dasar UIN Alauddin Makassar, guna sebagai acuan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembuatan aturan. Dalam statuta beberapa pasal menyinggung soal wewenang rektor dalam membuat aturan seperti pada pasal 1 nomor 3 bagian ketentuan umum, tapi tak satupun yang membahas mengenai SE 3652.

Ia juga mengatakan statuta kampus tidak menyatakan SE sebagai instrumen yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur dan membatasi kebebasan akademik mahasiswa.

“Berkaca di SE 2591 (kini berubah menjadi SE 3652) dilihat dari nomenklatur sebenarnya tidak mengikat,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa pada pedoman dan statuta kampus, kebijakan sepihak seperti SE 2591 bisa dianggap maladministrasi karena dikeluarkan tanpa melalui diskusi atau partisipasi dari sivitas akademika.

“Jika statuta kampus tidak mencantumkan SE sebagai produk hukum yang sah, maka SE tersebut secara otomatis dapat dianggap batal dan tidak memiliki implikasi hukum,” tambahnya.

SE 3652 tidak sesuai dengan norma statuta, apalagi poin c yang

membatasi kebebasan akademik dan kebebasan menyampaikan aspirasi dengan ketentuan izin tertulis.

Itu dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (5). Di situ ditegaskan bahwa kebebasan akademik bagian dari kebebasan sivitas akademika di universitas untuk menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab ilmiah, tanpa, menyebutkan keharusan untuk mendapatkan izin tertulis dari pimpinan.

Dalam statuta bab 1 ketentuan umum nomor 18 juga menegaskan, bahwa mahasiswa bagian dari sivitas akademika, yang berarti mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan akademik. Seperti pada pasal 11 ayat 1 sampai 5.

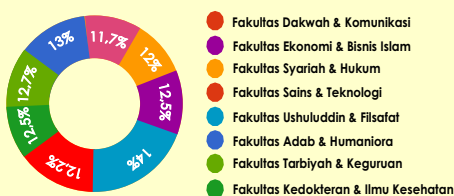
“Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa universitas.”

Melihat SE 3652 yang kata Kaswad merupakan penyempurnaan dari SE 2591 secara administratif. Washilah melakukan survei berupa kuesioner terkait dengan persepsi mahasiswa mengenai SE tersebut.

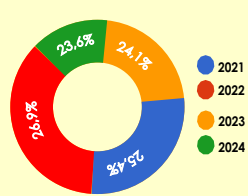
Hasil yang ditemukan banyak ketidakpuasan yang didapatkan mahasiswa terhadap SE 3652.

**Penulis: Arya Asb/
Nur Hastina
Editor: Rahmat Rizki

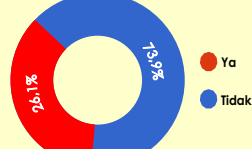
Jumlah partisipasi di setiap fakultas



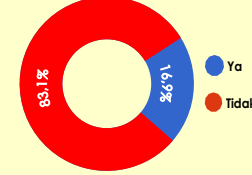
Angkatan



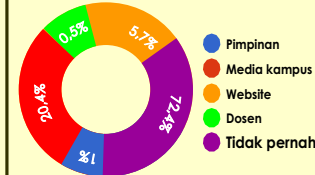
Apakah anda mengetahui tentang SE 3652 sebagai penyempurna SE 2591 tahun 2024?



Sebelum SE diterbitkan apakah anda pernah menerima sosialisasi?

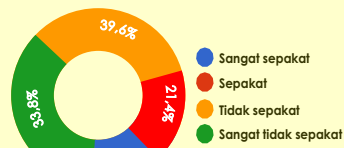


Kalau pernah, anda mendapatkannya melalui media apa?

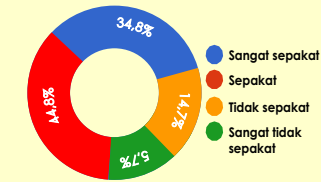


Salah satu poin SE yang baru masih memuat pasal kontroversial di SE sebelumnya yakni pelaksanaan penyampaian aspirasi mahasiswa wajib dilakukan secara bertanggungjawab melalui surat penyampaian kepada pimpinan universitas atau fakultas, sekaligus mendapat izin paling lambat 3x24 jam. Apakah anda sepakat dengan ini?

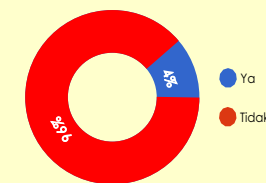
Apakah SE ini berdampak bagi anda?



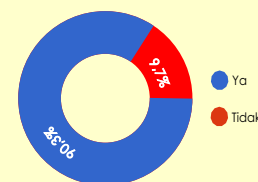
Apakah anda sepakat bila keberadaan SE 3652 mencederai konstitusi dan demokrasi?



Menurut anda, apakah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi layak diberi sanksi skorsing hingga drop out?



Apakah menurut anda SE 3652 ini sebaiknya dicabut?



Infografis: Washilah - Risnawati Suardi

Riset ini bertujuan mengetahui persepsi mahasiswa terkait dengan Surat Edaran (SE) 3652. Pengumpulan pendapat melalui metode pembagian kuesioner yang dilakukan Litbang Washilah pada 17 November hingga 23 November 2024. Dengan menggunakan *simple random sampling* untuk menentukan responden yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kami memilih 377 responden yang tersebar di delapan fakultas dengan *margin of error* 5%. Litbang Washilah memilih untuk menampilkan hasil kuesioner yang dianggap penting untuk diketahui sivitas akademika UIN Alauddin Makassar.

Jalan Panjang Kampus Peradaban

Washilah - Pada mulanya adalah Universitas Muslim Indonesia (UMI). Dan dengan keinginan Departemen Agama, dua Fakultas UMI dinegerikan pada Juni 1962, sebagai usaha mengembangkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di luar Yogyakarta. Dari sana cikal bakal kampus peradaban bermula.

Lalu pada tahun 1965, agar dapat berdiri sendiri, Fakultas Agama Islam UMI kemudian diintegrasikan menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN. Sebab dalam aturan pemerintah No. 27 tahun 1963, tentang syarat untuk sebuah institut dapat berdiri sendiri, yaitu memiliki sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas.

Syarat telah dikantongi. Berdirilah IAIN dengan nama "Alauddin," yang diambil dari sejarah Sultan Alauddin, Raja Gowa pertama yang memeluk Islam dan menyebarkannya di kawasan yang kini dikenal sebagai Indonesia Timur.

H Aroepala kemudian diangkat menjadi rektor pertama. Mempimpin IAIN Alauddin Makassar sejak awal berdiri hingga tahun 1968. Setelahnya, nahkoda terus berganti, Drs Muyiddin Zain (1968-1973), Prof Abdurrahman Syihab (1973-1979), Drs A Moerad Oesman (1979-1985), Dra Rasdiyanah (1985-1994), Drs M Shaleh (1994-1998), Prof Abd Muin (1998-2002).

Kampus telah melalui beberapa tahap perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan tujuh rektor tersebut. Pada masa awal, IAIN Alauddin lebih fokus pada pengajaran agama Islam dan didominasi oleh program-program studi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama dan pendidikan agama.

IAIN ke UIN

Karena ruang lingkup institut dianggap terbatas, hanya keilmuan dan pengkajian ke-Islaman saja, maka gagasan transformasi dari institut ke universitas kemudian menjadi wacana yang serius. Dengan perubahan itu, diharapkan dapat meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen lebih luas lagi, tidak hanya dominan pada orientasi dakwah, tetapi juga untuk merespon dan menghadapi masyarakat baru.

Sehingga, di bawah kepemimpinan Prof Azhar Arsyad (rektor, 2002-2011), kampus mengalami transformasi, dari IAIN ke UIN Alauddin. Perubahan itu terjadi pada tahun 2005, memasuki empat tahun masa jabatannya sebagai seorang rektor.

Mulanya, rancangan perubahan institut menjadi universitas masihlah mentah, maka gagasan itu kemudian lebih diperkokoh dengan pandangan dari beberapa sejawatnya, seperti Prof Ahmad Tafsir, seorang pakar pendidikan dari Bandung, Prof Abuddin Nata,

juga Dr Mulyadi Kartanegara yang melihat diperlukannya sosok yang mampu berpikir komprehensif saat ini, serta perlunya ilmu pengetahuan agama diperkaya dengan pengetahuan umum.

Ide itu pun terus disosialisasikan di lingkup IAIN Alauddin. Para pembantu rektor yang mendampingi Prof Azhar pada waktu itu juga ikut mendukung konversi tersebut. Hingga pada rapat Senat yang dilakukan pada 25 Juli 2002, ia meminta persetujuan dari para anggota Senat yang selanjutnya diberi mandat untuk memulai langkah perubahan status kampus.

Setelah persetujuan, delegasi dari IAIN segera dikirim ke Riau, Malang, Jakarta, dan Yogyakarta untuk melihat proposal UIN, serta contoh proposal Prodi yang diusulkan oleh UIN/IAIN Malang, Jakarta, dan Riau, termasuk dengan format proposal untuk memperoleh dana dari Islamic Development Bank (IDB).

Maka dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005, IAIN berubah menjadi UIN Alauddin Makassar, yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Desember 2005 di Makassar.

Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres), transformasi institut ke universitas dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Apa yang Terjadi Setelah Perubahan Status?

Perubahan status menjadi universitas, mengharuskan kampus untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima. Musabab itu pula kampus II pun dibangun dan diatur agar memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding kampus I yang sebelumnya bertempat di Jl Sultan Alauddin Makassar. Maka, dengan lahan seluas 32 hektar yang berlokasi di Samata, Kabupaten Gowa, kampus II pun mulai dibangun sejak Desember 2008.

Dengan perpindahan itu pula, kampus menambah dua buah fakultas: Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), serta Program Pascasarjana (PPs).

Pada tahun-tahun pertama perubahannya, perangkat kampus masih perlu bekerja keras. Tak dapat dipungkiri, keterbatasan fasilitas dan jumlah mahasiswa yang berkuliah masih jadi soal. Sebagaimana disampaikan mantan Rektor UIN Alauddin periode 2011-2015, Prof Qadir Gassing, ia mengaku pada saat itu jumlah mahasiswa masih minim.

Sehingga, usaha untuk meningkatkan popularitas kampus pun perlahan dijalankan, seperti mengampanyekan kampus di seko-

lah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.

"Diawali dengan kampanye habis-habisan oleh seluruh dosen. Tidak terkecuali tua dan muda. Saya minta untuk turun ke sekolah-sekolah," ungkapnya saat ditemui di lantai tiga Gedung Rektorat, (11/11/2024).

Selain sepi peminat, masalah lainnya ialah jumlah tenaga pengajar yang juga masih sedikit. Rasio antara mahasiswa dan dosen sudah lama menjadi persoalan tersendiri dalam hal akademik. Sekalipun mahasiswa perlahan bertambah jumlahnya, namun dosen yang mengajar juga perlu diperhatikan. Baik jumlah maupun kualitasnya.

Tak hanya fasilitas dan sistem perkuliahan yang menjadi sorotan, bentrok antar mahasiswa juga jadi satu masalah serius saat itu. Dari perang batu hingga tonjokan. Dan setelahnya, untuk meredam kekisruhan tersebut, kampus acap kali meliburkan mahasiswa, hal itu dianggap sebagai solusi agar bentrok tak berlanjut.

Di lain soal, Prof Qadir Gassing menganggap masalah mahasiswa yang dihadapinya semasa menjabat sebagai rektor adalah demonstrasi mahasiswa. Sebab ia pernah diberikan ultimatum langsung oleh wakil presiden, melalui perantara Walikota Makassar, untuk meredam aksi yang dilakukan mahasiswa di UIN Alauddin Makassar.

etikanya.

"Saya bahkan minta untuk didemo dengan hal yang perlu anda kritik, dengan catatan jangan anarkis, jangan memukul satpam, dosen sesama mahasiswa dan jangan memecahkan kaca atau bakar gedung," ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan mantan rektor UIN Alauddin Makassar, periode 2015-2019, Prof Musafir Pababbari. Menurutnya, sewaktu menjabat sebagai rektor, ia kerap kali didemo oleh mahasiswa.

"Saya ingat itu ketika saya didemo oleh mahasiswa, dan saya menganggap itu suatu hal yang wajar," pungkasnya saat ditemui di Gedung Dosen, (14/11/2024).

Masih lekat di ingatannya, kala ia didemo oleh ratusan mahasiswa yang menuntut rektor untuk mencabut aturan parkir berbayar pada Desember 2016 silam. Tak banyak tingkah, ia langsung menemui para mahasiswa yang sedang menunjukkan aksi protesnya kepada kebijakan yang dibuat oleh pimpinan kampus.

"Karena mahasiswa meminta saya untuk mencabut, langsung saya cabut hari itu juga," tegasnya, kala ia didesak mahasiswa untuk mencabut aturan parkir berbayar.

Selain itu, semasa Musafir Pababbari menjadi rektor UIN Alauddin, masalah keterbatasan

fasilitas belajar mengajar yang ada di kampus masih menjadi persoalan. Karena itu pula, dirinya membuat satu program utama, yaitu meningkatkan infrastruktur.

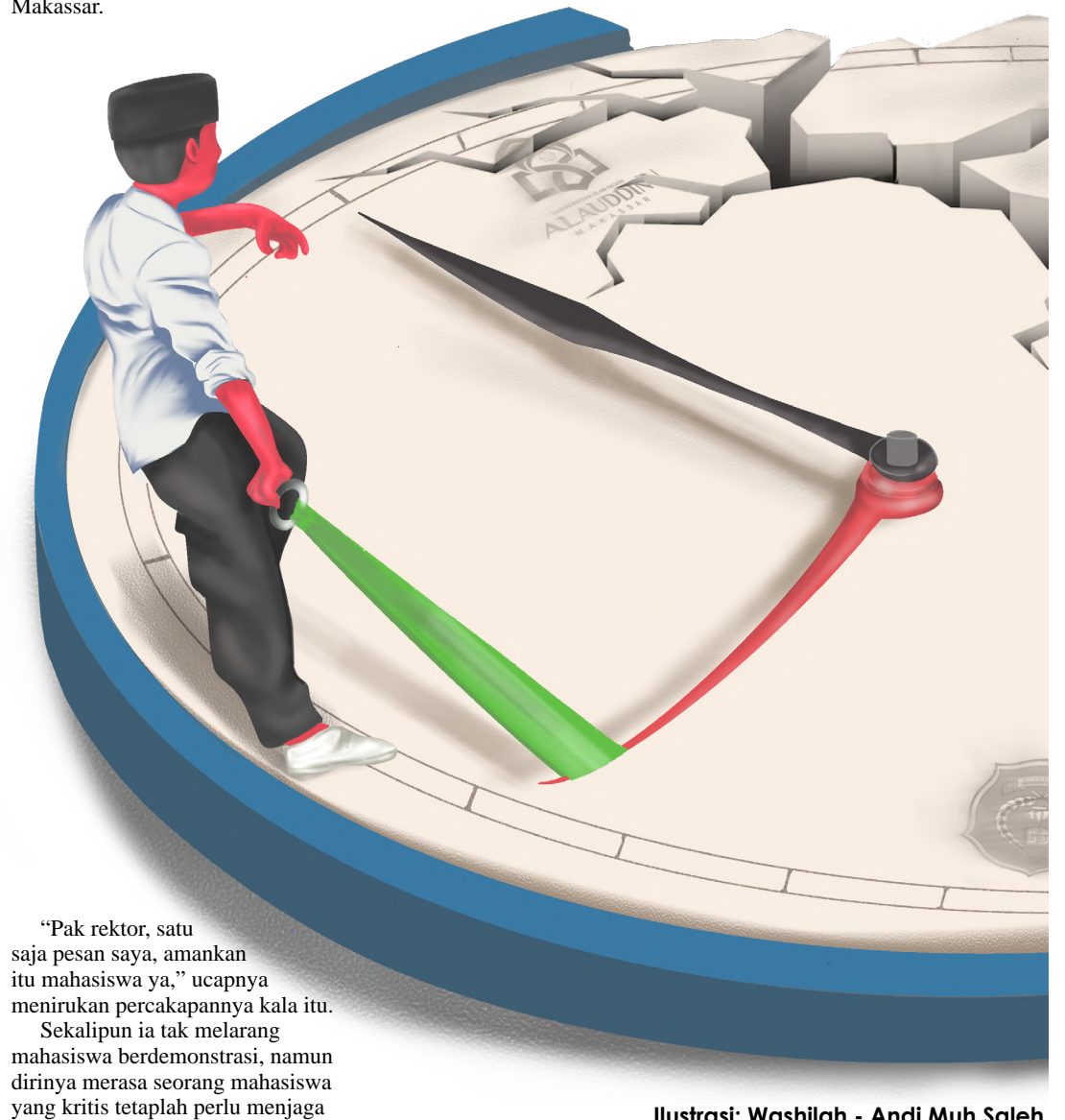
"Saat saya jadi rektor, miris hati saya itu kalau ada dosen dan mahasiswa belajar di bawah pohon, emperan masjid. Ini perguruan tinggi, bukan majelis tasawuf," ungkapnya.

Tertatih Meraih Peringkat!

Sewaktu berstatus IAIN, kampus masih berakreditasi C. Lalu setelah berganti UIN, di tangan Prof Qadir Gassing, kampus mendapatkan peringkat B. Kemudian saat jabatan rektor diganti oleh Prof Musafir Pababbari, ambisi meningkatkan akreditasi jadi perhatian utamanya. Mulai dengan peningkatan akreditasi instansi maupun Program Studi (Prodi).

Dalam tabloid yang pernah diterbitkan Washilah pada Agustus 2016, berjudul "Tertatih Mengejar Kualitas A," Musafir Pababbari menargetkan dalam tiga tahun menjabat, 70 persen Prodi akan berakreditasi A. Namun setelah satu tahun menjabat, peningkatan akreditasi tak signifikan. Mayoritas Prodi masih berakreditasi B.

Hingga pada 20 Desember 2018, setelah hampir empat tahun menggalakkan usaha menuju



"Pak rektor, satu saja pesan saya, amankan itu mahasiswa ya," ucapnya menirukan percakapannya kala itu.

Sekalipun ia tak melarang mahasiswa berdemonstrasi, namun dirinya merasa seorang mahasiswa yang kritis tetaplah perlu menjaga

peringkat yang lebih tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 466/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 menetapkan UIN Alauddin sebagai kampus berakreditasi A yang berlaku hingga 20 Desember 2023.

Jabatan rektor pun berganti ke tangan Prof Hamdan Juhannis pada 2019. Tak berselang lama setelah akreditasi A berakhir, BAN-PT dengan Nomor: 428/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2024 kemudian menetapkan UIN Alauddin berstatus unggul yang mulai berlaku tanggal 16 April 2024 sampai 21 Desember 2028.

Perubahan status dari A menjadi unggul sontak diapresiasi banyak pihak. Ucapan selamat berbondong-bondong dialamatkan ke Kampus Peradaban. Banyak yang merasa senang dengan apa yang baru diraih kampus. Tapi tidak dengan Saldi, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH). Ia malah menyayangkan kondisi fasilitas yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan kampus lain yang ada di Makassar.

"Ruang kelas, kursi dan meja yang tidak diperbarui sejak 2017. Bagaimana caranya bisa dika-

takan kampus unggul kira-kira?" keluhnya.

Jika dikaji lebih lanjut, kategori penilaian akreditasi dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, sarana dan prasarana juga termasuk dalam indikator penilaian.

Senada dengan Saldi, mahasiswa UIN Alauddin angkatan 2021 bernama Masda, memandang kampus seharusnya lebih memperhatikan fasilitas, proses pembelajaran, dan sistem yang diterapkan masih jauh dari kata unggul.

"Fasilitas dalam kelas misalnya, yang masih menggunakan kursi kayu dan AC yang kadang rusak," jelasnya.

Metamorfosis Sempurna: PTKIN-BH?

Setelah semua yang telah diraih oleh UIN Alauddin, ambisi berikutnya di tangan Hamdan Juhannis adalah mengubah status kampus menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berbadan Hukum (PTKIN-BH). Sebagaimana yang ia paparkan dalam visi misi rektor UIN Alauddin Makassar

periode keduanya, 2023-2027.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2020, tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, UIN Alauddin perlu memenuhi beberapa syarat selain presentasi prodi unggul, di antaranya, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, memiliki kelayakan finansial, kerja sama dengan dunia industri dan lainnya.

Jika saja wacana PTKIN-BH terwujud, maka UIN Alauddin akan memiliki otonomi sendiri dalam mengatur keuangannya. Selaras dengan tujuan perubahan PTN BLU ke PTN BH yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014, guna memberikan otonomi sebebaskan-bebasnya terhadap PTN melalui PTN BH.

Singkatnya, kampus tidak lagi menerima bantuan keuangan negara. Sehingga, kampus di kemudian hari mesti memiliki banyak sumber penghasilan untuk membiayai operasional

kampus. Yang dengannya akan membuka keran komersialisasi pendidikan.

Mengenai ambisi itu, Washilah berupaya mengkonfirmasi kepada Rektor UIN Alauddin Hamdan. Namun hingga berita ini terbit, rektor enggan membuka suara.

Pada Tabloid Washilah Edisi 118, "MBKM: Karpet Merah Menuju Komersialisasi Pendidikan," beberapa kampus yang lebih dulu beralih menjadi PTN BH mengalami kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara signifikan.

Seperti yang dialami Universitas Hasanuddin (Unhas). Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus di jalur ujian mandiri akan dibebankan dengan Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) yang menyentuh angka 50 juta per mahasiswa dilampirkan UKT/BKT Unhas pada tahun 2017.

Selain Unhas, Universitas Diponegoro (Undip) juga serupa. Mengutip dari Lembaga Pers Mahasiswa, Manunggal, Pembantu Rektor II Undip, Darsono menjelaskan bahwa bantuan dana dari pemerintah sejak men-

jadi PTN-BH menurun signifikan, padahal kebutuhan operasional semakin meningkat. Sejumlah fakultas di Undip pun menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pada April 2022 lalu, Universitas Sumatera Utara (USU) mengumumkan kenaikan UKT untuk mahasiswanya. Di Universitas Gadjah Mada (UGM), pihak kampus menerbitkan wacana penetapan uang pangkal. Universitas Indonesia (UI) sendiri telah lebih dulu menaikkan UKT pada 2021 lalu.

Menanggapi polemik tersebut, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Dhia AI-Uyun mengatakan, seharusnya jika akreditasi meningkat, maka dana dari pemerintah akan bertambah. Menurutnya, PTN BH merupakan sebuah sistem yang cacat.

"Pada akhirnya mahasiswa yang akan menjadi korban. Karena tujuannya (PTN BH) bukan memajukan pendidikan namun menyiaipkan tenaga kerja," katanya.

*Penulis: Hardiyanti/Amalia Waliffah

*Editor: Rahmat Rizki



Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis. | Foto: Istimewa






Washilah Tersedia di Spotify
Dengarkan Sekarang di
WASHILAH podcast



UKM Taekwondo Dominasi Unhas Cup, Borong 29 Medali



Foto: Dokumentasi pribadi Irfan Rusli.

Washilah - “Ternyata taekwondo secandu itu,” tutur Muhammad Irfan Rusli, pemenang lomba taekwondo mewakili UIN Alauddin Makassar pada ajang Unhas Cup 2024 Tingkat Nasional.

Irfan tak menyangka lantaran baru kurang lebih empat bulan dirinya menggeluti dunia taekwondo dengan dasar coba-coba membawanya pada medali emas pertama pada Kyorugi kategori pemula yang berlangsung 25-27 Oktober 2024 di Gelanggang Olahraga (GOR) Unhas lalu.

Bukan hal yang mudah bagi Irfan untuk bisa ikut berpartisipasi pada perlombaan tersebut. Awal mendaftarkan diri, mahasiswa semester dua itu harus menyisihkan sebagian uang jajan yang ia miliki untuk biaya registrasi hingga mencapai nominal 350 ribu. Tidak kecil untuk kantong mahasiswa tentunya.

Tak punya kemampuan dasar dalam dunia beladiri, mengharuskan Irfan melewati berbagai latihan untuk menunjang penampilannya. Mulai dari latihan kelenturan, latihan fisik dan menendang hingga latihan sparring atau Kyorugi selama satu bulan lamanya.

“Minggu terakhir, penurunan porsi latihan dan masa tenang. Bahkan kami berendam di air es, agar badan yang sudah dilatih keras bisa pulih seperti keadaan semula,” jelasnya.

Hal tersebut tidak dipermasalahkan kader angkatan 33 itu, justru yang ia keluhkan akan jam malam yang diterapkan kampus yang berakibat pada Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) tidak dapat digunakan. Menyulitkan bagi Irfan dan rekannya apabila tempat latihan tidak menaui kejelasan.

“Padahal kami membawa nama UIN sendiri, namun anehnya malah dilarang latihan malam,” mirisnya.

Memasuki perlombaan, awal pertandingan Irfan kalah telak. Ronde pertama harus dimenangkan pihak lawan yakni pihak Taekwondo Kachak dengan perolehan 21 poin, selisih 3 sampai 5 poin dengan Irfan.

Ronde kedua kemudian dilanjutkan, keberuntungan berpihak pada Irfan. Dirinya berhasil meraup 12 poin sedang lawannya hanya berhasil mengumpulkan 1 poin.

Pertandingan semakin sengit ketika ronde ketiga berlangsung, sebab terjadi seri antara Irfan dan pihak musuh karena berhasil unggul di masing-masing babak.

“Di ronde tambahan saya menang, poin saya 6 dan lawan saya 5,” tambahnya.

Apa yang ia tuai selama latihan akhirnya berbuah manis, Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam itu berhasil memboyong medali emas.

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo, Nur Khudzaifah membenarkan terkait tempat latihan yang tidak menentu diucapkan Irfan. Ia bilang karena hal tersebut dirinya harus memutar otak agar latihan para rekannya tetap dapat berjalan.

“Mau tidak mau kita harus cari tempat, dikelilingi ini S-mata dan sekitarnya untuk cari yang terdekat,” keluhnya.

Meskipun demikian, Seva—begitu sapaan akrabnya menaruh banyak harapan melalui ajang Unhas Cup 2024 Tingkat Nasional ini, salah satunya agar rekannya mendapat hal yang lebih dari yang diterima hingga saat ini.

Irfan adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa UKM Taekwondo yang membawa nama harum UIN Alauddin dalam Unhas Cup 2024 Tingkat Nasional. Diketahui, taekwondo berhasil meraih 29 medali. Diantaranya, untuk kategori pemula yakni 9 Medali Emas Cabang Kyorugi, 15 Medali Perak Cabang Kyorugi sedangkan kategori prestasi yakni 1 Medali Perak Cabang Kyorugi serta 4 Medali Perunggu dengan rincian 1 Kyorugi dan 3 Poomsae.

Dewan Pembina UKM Taekwondo, Syahrir Karim juga ikut membuatkan keresahan yang dirasakan rekan UKM Taekwondo. Menurutnya, hal seperti itu layaknya disampaikan kepada pimpinan.

“Kita coba inisiasi ini untuk duduk bersama, berbincang secara serius hal-hal yang mendasar ini,” ungkapnya.

Selain itu, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat itu juga ikut merasa bangga atas apa yang diraih mahasiswa binaannya. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa dirinya telah melakukan pembinaan secara maksimal.

*Penulis: Nadhilla Putri Hasir
*Editor: Sriwahyuni

Pengenalan Budaya, 3 Mahasiswa FDK Juara 1 Film Pendek

Washilah - Tiga Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar mengantongi juara satu pada ajang perlombaan film pendek yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, di Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa, Rabu (6/11/2024).

Ketiga mahasiswa tersebut yakni A Mutia Dirgahayu Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) serta Syahril dan Muh Ichsana Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dengan tajuk yang diusung “Jejak Kejayaan Gowa-Tallo di Abad 17 di Museum Karaeng Pattingalloang.”

Menurut Mutia perlu ajang perlombaan semacam ini, yakni mengemas budaya dalam bentuk dokumenter. Dia sebut film merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mempersuasi khalayak agar lebih mengenal warisan budaya, seperti halnya Museum Karaeng Pattingalloang, mengingat generasi sekarang lebih menyukai konten audio visual.

“Secara tidak langsung kami sudah berperan dalam melestarikan budaya dan menghidupkan kembali kisah sejarah yang penuh inspiratif,” ucapnya.

Tidak mudah bagi mahasiswa semester lima itu, pasalnya sebelumnya ia pernah mengikuti lomba serupa tapi tak berhasil. Pantang menyerah, dengan bekal waktu kurang lebih dua minggu lamanya perjuangan dengan rekannya akhirnya berhasil.

“Mulai observasi lokasi, pembuatan naskah, take video yang kurang lebih tiga hari berturut-turut sampai pada tahap editing yang kisanam enam atau tujuh hari,” jelasnya.

Pun begitu, lomba tersebut juga dilakukan tanpa binaan kata Mutia. Lanjutnya, tak berharap banyak, Mutia ingin agar kedepannya karya yang diramu dalam bentuk film tidak hanya menghibur tapi juga mendidik serta memberikan dampak positif dari generasi ke generasi.



Foto: Dokumentasi pribadi A Mutia Dirgahayu, Muh Ichsana dan Syahril.

Ketua Jurusan BPI, Dr St Rahmatiah turut mengapresiasi anak didiknya itu. Menurutnya, lomba perlu dipertahankan bukan hanya pada kanca nasional juga internasional.

Akhir kata, Rahmatiah sebut prestasi adalah penunjang untuk meningkatkan prestise. Untuk itu, bakat perlu diasah

disertai pemberian *reward* guna memotivasi mahasiswa yang biasanya diberikan oleh pihak kampus.

*Penulis: Nadhilla Putri Hasir
*Editor: Sriwahyuni

Kampus Krisis Kritisme

Washilah - Keberadaan Lembaga Kemahasiswaan (LK) berperan sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak birokrasi kampus untuk menyampaikan kebutuhan, keresahan, atau masukan yang relevan, baik terkait fasilitas, kebijakan, maupun isu lainnya. Namun, sejumlah LK menilai bahwa peran tersebut mulai tersisih oleh pola kebijakan birokrasi yang cenderung bersikap tirani dan kurang melibatkan diskusi bersama, sehingga mengaburkan fungsi lembaga kemahasiswaan sebagai mitra kritis kampus.

Sekjen Dema-U UIN Alauddin Makassar

Supaya perumusan kebijakan itu tidak *top down* dan berpotensi merugikan beberapa pihak karena ada hak yang dilanggar, maka partisipasi publik khususnya lembaga kemahasiswaan sebagai mitra kritis kampus harus turut dilibatkan. Sistem demokrasi partisipatoris itu harus hadir di setiap ruang-ruang dalam kampus. Kampus hidup dengan tradisi diskusi dan berdebat, ide-ide segar bermekaran guna menemukan solusi di setiap permasalahan, baik dalam kampus maupun bangsa dan negara.



Muh Reski



Nur Rahman Haryadi

Ketua Umum Dema FUF

Idealnya, lembaga kemahasiswaan yang notabene dipenuhi oleh mahasiswa kritis, seharusnya dilibatkan dalam sosialisasi penetapan regulasi kampus karena mereka punya legal *standing* sebagai pengurus lembaga yang telah dilantik secara sah, yang artinya mereka bagian dari motorik kampus.

Ketua Umum Dema FSH

Sangat penting karena salah satu lembaga yang dekat dengan birokrasi dan mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan.



Muhammad Nur Haikal



Agung Putra

Ketua UKK KSR-PMI UIN Alauddin Makassar

Menurut saya sangat penting karena mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, baik itu mahasiswa secara umum atau berkelompok. Teman-teman di himpunan mempunyai beberapa macam sifat aspirasi, baik itu mengaspresiasi fasilitas, maupun mengaspresiasi kebijakan-kebijakan, contohnya kebijakan jam malam.

Ketua Umum UKM Olahraga

Penting karena dengan adanya LK itu lebih mempermudah *ki* mahasiswa untuk menyampaikan keresahannya di kampus lewat LK kampus sampai ke birokrasi. Tapi sesuai yang saya amati semakin kesini, LK kampus serasa *nda* terlalu berfungsi *mi* sesuai semestinya. Yang seharusnya LK kampus itu diisi dengan orang-orang yang cerdas, kritis dan juga sikapnya memang harus memperlihatkan representasi dari seluruh mahasiswa yang ada di universitas.



Ilham



Muhammad Raehan Ramdhani

Ketua Umum UKM Kopma

Sebenarnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan sangat penting dalam dunia kampus, pasalnya untuk mendukung apa yang diinginkan mahasiswa dan bisa sampai kepada pihak kampus (rektor). Saya mendukung penuh supaya terlibat langsung karena menyangkut orang banyak dan salah satu caranya lembaga kemahasiswaan harus turut andil dalam mengawal langkah-langkah mahasiswa, juga kebebasan berpendapat, baik itu mengkritik dan lainnya, itu adalah hak individual manusia. Kehadiran lembaga kemahasiswaan tentu sangat efisien.

Ketua UKM Menwa Satuan 703 UIN Alauddin Makassar

Tentu ini penting, karena yang betul-betul tau keperluan mahasiswa tentu mahasiswa itu sendiri. Lembaga kemahasiswaan yang di kampus merupakan perwakilan dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, kritik maupun masukan kepada pihak rektorat ataupun sebaliknya dari rektor ke mahasiswa.



Mutmainnah



Andi Futra Aulia

Ketua Umum UKM Black Panther

Pastinya sangat penting, dimana lembaga kampus saling berkaitan satu sama lain. Kampus butuh UKM dan UKM butuh kampus. Kampus dikenal karena prestasi-prestasi mahasiswanya sebaliknya juga lembaga butuh kampus untuk segala keperluan administrasi.

Ketua Sema FAH

Lembaga kemahasiswaan bukan hanya berperan melakukan kegiatan atau pengembangan pada mahasiswa tetapi juga berperan sebagai agen kritis birokrasi. Ketika ada aspirasi yang diberikan kepada rektorat dari lembaga kemahasiswaan, tentunya pihak rektorat harus menerima kritikan dan masukan. Tapi selama ini yang kita amati bersama pimpinan terlalu otoriter terhadap kewenangan atau konstitusi yang dibuat di dalam kampus, bahkan untuk surat edaran dia mengambil kebijakan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pimpinan lain juga dengan lembaga kemahasiswaan. Seharusnya sebelum dikeluarkannya SE itu, ada pembahasan atau dalam bentuk konsolidasi kepada mahasiswa tentang surat yang dikeluarkan.



Fikri



Bahrul Hidayat

Wakil Ketua HMJ Biologi

Melibatkan LK dalam penyerapan aspirasi menunjukkan bahwa suara mahasiswa dihargai dalam tata kelola kampus. Hal ini memupuk rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Mungkin ini salah satu dari banyak hal yang menjadikan keterlibatan LK kampus dalam penyerapan aspirasi itu penting.

PKM Tak Memadai, 2025 Wacana Perbaikan

Washilah - Kabar perbaikan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN Alauddin Makassar berhembus. Pihak kampus memastikan perbaikan akan dilakukan pada 2025, menyesuaikan dengan anggaran yang dikurcurkan oleh pemerintah pusat.

Keoptimisan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum UIN Alauddin Makassar, Salman. Baginya, tidak ada alasan khusus yang melatarbelakangi perbaikan PKM ini selain dari kewajaran bahwa jika fasilitas memang sudah rusak maka harus segera dilakukan perbaikan.

"(Perbaikan ini) tidak ada urusannya dengan alasan sudah akreditasi unggul," tekannya.

Meski telah melaporkan setiap lini kebutuhan perbaikan melalui proposal yang dikirim ke pihak kementerian agama, ia tidak menjanjikan alokasi dana diterima.

"Nilainya akan sama persis dengan anggaran dana pada proposal, maka dari itu berapapun dana kedepannya yang diterima untuk perbaikan, akan digunakan semaksimal mungkin," ucapnya.

Dana terbatas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut akan diuraikan kepada perbaikan bagian-bagian krusial seperti kipas



Kondisi gedung PKM dari depan yang menanti perbaikan, Sabtu (13/12/2024). | Foto: Washilah - Aa Min Abduh.

angin, bata berlubang, kunci, kursi, lampu, pemasangan kaca jendela hingga perbaikan hal-hal yang rusak.

"Anggaran perbaikan tidak berasal dari kampus ataupun Badan Layanan Umum (BLU) melainkan dari pusat," jelasnya saat ditemui Reporter Washilah pada 4 Oktober 2024.

Rencana ini kemudian menuai respon dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menghabiskan lebih banyak waktu

berkegiatan di Gedung PKM seperti UKM Seni Budaya (SB) eSA, UKM Taekwondo, hingga Unit Kegiatan Khusus (UKK) Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) Unit 107 UIN Alauddin Makassar.

Mendengar kabar tersebut, Ketua Umum UKM SB eSA, Muh Amril Ardiansyah mendambakan tempat alternatif agar setiap aktivitas UKM tetap berjalan sementara perbaikan PKM berlangsung.

"Semoga cepat dilaksanakan

agar kepengurusan selanjutnya tidak mengalami kendala yang sama," ujarnya.

Secara umum, keresahan utama yang dirasakan anggota UKM SB eSA di Gedung PKM dikarenakan seringnya terjadi pemadaman listrik dan kesulitan akses air yang kerap menghambat kegiatan mereka. Selain itu, keterbatasan ruang latihan pada malam hari juga menjadi kendala, sehingga anggota UKM SB eSA harus mencari tempat di luar kampus untuk berlatih.

"Kami sering mencari tempat di luar saat ada kegiatan malam," lanjut Amril.

Senada dengan itu, Ketua Umum UKK KSR PMI, Agung Putra menyoroti fasilitas gedung PKM yang dianggap tidak memadai. Baginya, gedung PKM membutuhkan perbaikan signifikan, baik di bagian luar maupun dalam gedung.

"Di dalam lantai satu memerlukan pembenahan, terutama di ruangan-ruangan lantai dua yang rawan merembes saat hujan," ucapnya.

Di sisi lain, harapan Ketua Umum UKM Taekwondo, Nur Khudzaifah lebih fokus pada perbaikan toilet yang kondisinya memprihatinkan dan tidak layak pakai.

Sebagai UKM yang kerap melakukan pertandingan antar universitas di gedung PKM, Khudzaifah merasa ganjil bila peserta dari kampus lain seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Bosowa, hingga Politeknik datang dan ingin menggunakan toilet yang tidak berfungsi dengan baik.

"Ini bisa menjadi *image* yang kurang baik di mata mereka terkait kampus ini," tutupnya.

*Penulis: Siti Ulwiyah/
Muh Iqbal Mufid
*Editor: Rusmianti

Jurusan Baru, Urusan Baru

Washilah - Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Alauddin Makassar tengah mencanangkan pembukaan Program Studi (Prodi) baru, yakni Prodi Sastra Indonesia.

Penggarapan Prodi baru ini telah dimulai sejak Februari 2024 dan kini memasuki tahap pengumpulan dokumen ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis), Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI).

Diketahui, dalam pembentukan Prodi baru di Perguruan Tinggi Kampus Islam (PTKI), seluruh persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Diktis Kemenag RI harus dipenuhi. Ketua Panitia Khusus (Pansus), Syamhari menjelaskan bahwa pembentukan Prodi Sastra Indonesia sebagai upaya mengembangkan keilmuan Bahasa Indonesia di UIN Alauddin Makassar, yang saat ini belum memiliki kajian khusus di bidang tersebut, meski kampus sudah terakreditasi unggul.

"Langkah ini juga untuk memperkaya khazanah keilmuan di lingkup fakultas, yang saat ini memiliki empat Prodi. Jika Prodi Sastra Indonesia berdiri, maka jumlah Prodi di FAH bertambah menjadi lima," ujarnya.

Syamhari menambahkan, dokumen persyaratan pembentukan Prodi telah siap dan akan *submit*

ke Diktis Kemenag RI pada pekan ketiga Oktober 2024. Setelah itu, sisa menunggu asesmen lapangan serta pematapan dokumen.

"Kami sudah kirim di sistem. *Submit* terakhir, insyaAllah, paling lambat pekan ketiga di bulan Oktober. Kalau bisa, target dekan itu kita asesmen sebelum akhir tahun 2024," jelasnya.

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Syamhari mengatakan untuk Prodi Sastra Indonesia telah memiliki tenaga pendidik yang mumpuni. Di antaranya satu orang professor, tujuh doktor, dua magister, satu lektor, dan sisanya lektor kepala.

"Jika memang kita diberkahi kesempatan untuk membuka, bisa langsung mengajukan unggul nanti akreditasinya. Dari segi SDM, ini sangat mendukung, karena sudah ada guru besarnya satu," tuturnya.

Ia juga optimis penggarapan Prodi ini akan rampung di tahun 2024 dan akan menerima mahasiswa baru pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2025 mendatang.

Namun, Ketua Dema FAH, Siti Arbainna mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterbatasan ruangan di fakultas. Menurutnya, masalah fasilitas, seperti ruang kelas, harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menambah Prodi baru.

"Kalau memang mau diadakan Prodi baru, harusnya lebih awal diwacanakan ruangan dan kelas-kelasnya. Semoga berjalan *ki* ada



Gedung Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. | Foto: Washilah - Hardiyanti.

yang tersedia. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Irvan Muliadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan pemanfaatan gedung pascasarjana lama yang akan kosong setelah gedung pascasarjana baru selesai dibangun.

"Setelah gedung pascasarjana baru selesai, kami akan mengusulkan ke rektor untuk menyiapkan ruangan dan perangkat-perangkat jurusan," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof Andi Aderus menegaskan bahwa kekurangan ruangan di FAH dan penggunaan gedung pascasarjana lama, nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan (Rapim).

yang tersedia.

"Tidak bisa diputuskan sepihak.

Akan dibicarakan secara bersama nanti bagaimana penggunaannya, kan belum ada juga jurusannya. Kalau sudah siap nanti kita lihat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan rencana untuk memanfaatkan gedung di Kampus I UIN Alauddin Makassar, dengan memindahkan sebagian aktivitas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) ke sana.

"Misalnya untuk FKIK, bisa digeser sebagian ke sana, sehingga berkurang lagi mahasiswa di sini. Pasti ada ruangan yang kosong, yang berarti kita tinggalkan manfaat yang lain," tuturnya.

*Penulis: M Nur Fathun
Na'im Syaiful/Risnawati Suardi
*Editor: Desviana

Semerbak Isu Kekerasan Seksual di Kampus Responsif Gender

Washilah – Salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Arini, saban bulan melapor pada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kekerasan Seksual (KS) kampus peradaban atas dugaan kekerasan berbasis gender yang ia alami. Saat itu, ia bertemu langsung dengan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang menaungi ULT KS, Djuwairiah Ahmad. Beberapa data dan keterangan ia tulis dalam beberapa kertas yang diberikan padanya, salah satunya berisi kronologi kejadian.

Arini bukan nama sebenarnya. Sejak pelaporan tersebut, Arini telah melewati berbagai kejadian. Dari sana, ia menilai Satgas ULT KS belum bisa memahami dengan benar perspektif korban atau pelapor. Arini menuturkan, kampus tidak benar-benar siap untuk menyediakan ruang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual.

“Pelaku masih berkeliaran di area kampus, itu menandakan kampus bukan lagi ruang aman,” ujar dia.

ULT KS dianggap kurang profesional dan lamban dalam proses penanganannya menurut Arini. Ia bercerita pada saat melaporkan kasusnya, ia melakukan konsultasi dengan tim psikolog yang disediakan oleh ULT KS UIN Alauddin Makassar setelah seminggu melakukan pelaporan.

Pada saat konsultasi, bukannya menerima kata-kata yang menjadi obat untuk kesehatan mentalnya, ia malah disudutkan dan pembahasan yang dibicarakan justru tidak seputar kondisi mental dan kejadiannya. Sejak melaporkan kasusnya, hingga berita ini ditulis, Arini tidak lagi mendapati kabar dan tidak menahui sudah sampai mana kasusnya bergulir.

Padahal, jika merujuk pada *Standar Operating Procedure (SOP)* Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan KS pada UIN Alauddin Makassar 2021, salah satu mekanisme penanganan KS ialah “...Mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada korban hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial...” yang dari semua aspek tersebut, menurut Arini tidak ada yang ia dapatkan.

Keberadaan ULT KS menurut Arini, hanya sebagai pemenuhan regulasi semata, sebab tidak

ada kasus yang benar-benar diselesaikan oleh ULT KS dan diadili sejauh ini menurutnya.

Narasi Arini sejalan dengan Staf Perempuan, Anak, & Disabilitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Nunuk Songki. Nunuk dalam wawancaranya lewat Surel WhatsApp, mengatakan bahwa dalam catatan LBH Makassar, ada 4 laporan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual yang masuk sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

Nunuk bercerita bahwa kasus terakhir yang ditangani oleh LBH Makassar baru-baru ini telah mencapai benang merah, pelaku dijatuhi vonis dan secara resmi dinyatakan bersalah di salah satu pengadilan di Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, Nunuk juga menceritakan bahwa ia pernah bertanya pada salah satu dari korban yang melapor ke LBH, mengapa korban lebih memilih melapor ke LBH ketimbang ULT KS kampus. Kata Nunuk, si korban itu sempat melaporkan kasusnya pada ULT KS UIN Alauddin Makassar. Namun, si korban merasa tidak nyaman serta merasa disalahkan pada kasus yang ia alami.

Merujuk pada pelaporan 4 kasus kekerasan berbasis gender & seksual yang tidak ditangani dalam area kampus tersebut, Nunuk sebut ULT KS UIN Alauddin Makassar belum bekerja secara maksimal.

“Kenapa belum maksimal? karena itu tadi, ada bukti bahwa kasus-kasus yang kekerasan berbasis gender ini tidak mampu diselesaikan di internal UIN Alauddin, yang padahal seharusnya kalau ada kasus kekerasan berbasis gender itu idealnya melapor di kampus. Lalu kampus yang kemudian mungkin berkoordinasi atau menjerang teman-teman di luar, walaupun kasusnya itu besar misalnya,” jelas Nunuk.

Dirinya juga menilai ULT KS kampus tidak transparan dalam penanganan kasusnya, transparansi yang Nunuk maksud, mengenai sejauh mana ULT KS bekerja sebagai lembaga independen yang mengurus tentang isu dengan konsen kekerasan berbasis gender di dalam kampus, terkhusus kekerasan seksual.

“Hari ini kan tidak ada lapo-

ran bulanan, laporan pertiga bulanan, enam bulan, atau pertahun. Itukan tidak ada. Jadinya publik atau mahasiswa di UIN Alauddin Makassar tidak mengetahui sejauh mana Satgas itu bekerja,” tuturnya.

PSGA UIN Alauddin Makassar sendiri baru saja meraih penghargaan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) responsif gender tahun 2024 tingkat madya pada Oktober 2024 lalu. Diketahui, penghargaan itu digandeng berkat hasil dari upaya berkelanjutan PSGA UIN Alauddin Makassar dalam memajukan kesetaraan gender di lingkungan kampus.

Dari keterangan Ketua PSGA, Djuwairiah, pemetaan predikat PTKI responsif gender terdiri dari tiga tingkatan. Di antaranya pratama, madya dan utama. Kegiatan ini, kata dia diselenggarakan setiap tahunnya, dan predikat pratama diraih UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022 hingga 2023.

Diketahui, ada sejumlah indikator yang menjadi kriteria penghargaan tersebut, diantaranya operasionalisasi kebijakan kelembagaan, tri-dharma perguruan tinggi, tata kelola kelembagaan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penciptaan *zero tolerance* pada semua

bentuk kekerasan di perguruan tinggi.

Ironinya, walau telah mendapat kenaikan predikat menuju madya, isu gender baik

Kekerasan Seksual (KS) maupun kekerasan berbasis gender masih saja lalu-lalang di kampus peradaban.

Padahal, Djuwairiah mengklaim pihaknya aktif melakukan sosialisasi terutama pada momentum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang diselenggarakan setahun sekali.

“Dan itu dikoordinir oleh WD (Wakil Dekan) III masing-masing dengan harapan bisa meminimalisir kekerasan di kampus terlebih kita menyandang status kampus islam,” sambungnya.

Selain cara tersebut, ia juga mengaku kerap melakukan teguran personal pada perempuan-perempuan yang bersangkutan bila perlu.



Ilustrasi: Washilah - M Nur Fathun Na'im Syaiful

KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR LIMA TAHUN TERAKHIR

Tahun	Kasus	Korban	Pelaku
2020	<ul style="list-style-type: none"> Pelecehan seksual Kekerasan gender berbasis online 	<ul style="list-style-type: none"> 10 mahasiswi korban 18 mahasiswi korban 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terungkap Mahasiswa Drop Out berinisial KMA
2021	Pelecehan seksual	Mulan (nama samaran), mahasiswi UIN Alauddin Makassar	Belum diketahui
2022	Intimidasi seksual	Mahasiswa tarbiyah	Belum diketahui
2023	Eksplorasi seksual	Mahasiswa syariah	Staf Syariah
2024	Kekerasan berbasis gender korban	Mahasiswi Angkatan 2022	Personil Satpam

“Misalnya saya berikan teguran terhadap pakaian yang dipakai karena hal itu termasuk pancingan mendatangkan hal seperti itu, jadi pakaian yang sopan dan berbicara juga perlu untuk diingatkan. Walaupun sudah lurus *ji* hal begituananya namun masih ada bentuk kekerasan seksual maka pelakunya yang salah,” kata dia.

Lanjutnya, setahun terakhir ia menerima laporan secara resmi sebanyak 2 kasus. Hingga saat ini, kedua kasus tersebut kata dia masih dalam tahap pendampingan dan timnya belum melakukan tindakan.

Ia berdalih jika salah satu dari kasus tersebut tidak dilakukan penindakan lantaran pelapor tidak lagi pernah menyambangi ULT KS. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Arini yang juga pernah melaporkan kasusnya pada ULT KS. Arini justru merasa tidak pernah mendapatkan panggilan ataupun komunikasi dari pihak ULT KS.

*Penulis: A Soesilo Ridwan/
Hulwana Ahsyani
*Editor: Saldi Adrian

Manusia Barang Bekas

Washilah - Pagi buta di hari Minggu (8/12), Naim menyusuri setiap sudut Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang. Di waktu ini, GOR disulap menjadi pasar. Berbagai barang vintage tersedia di sana. Dan untuk itulah ia datang. Demi mencoba peruntungan dengan menggali "harta karun". Atau mungkin lebih dikenal dengan *thrift*.

Mulai dari deretan pakaian-pakaian bekas yang digantung dan tersusun sedemikian rupa, sehingga tumpukan yang tidak berbentuk ia utak-atik. Ia tampaknya menikmati betul momen tersebut. Sesekali tangannya meraih sebuah baju ataupun celana. Setiap utas yang ia sentuh diraba setiap sudutnya. Acap kali Naim mengeluarkan ponsel sembari memeriksa kode pakaian tersebut di mesin pencariannya. Bila beruntung, kode yang ia masukkan akan menampilkan barang tersebut. Keseluruhan proses inilah yang Naim sebut sebagai, "Menggali harta karun".

Thrift atau cakar sendiri mulai naik daun pasca pandemi Covid-19. Walau begitu, sedari kecil Naim sudah familiar dengan kegiatan tersebut. Sebab dulu ayahnya juga sempat menggeluti bisnis *thrift*. Naim kecil diperkenalkan dan diajarkan untuk menggunakan barang-barang bekas—walaupun sebelum *trend*, *thrift* masih dipandang sebelah mata. Saat duduk di bangku

SMA dan *trend online shopping* tengah marak, Naim mengaku sempat menjadi *local pride enthusiast*—sebutan bagi orang-orang yang gemar membeli produk lokal buatan anak bangsa—selama beberapa waktu. Hanya saja, kebiasaannya membeli barang *thrift* membuat Naim sadar, jika kualitas bahan produk lokal yang ia beli dengan harga selangit tidak sebanding dengan bahan baju *thrift* yang harganya seuprit.

"Intinya beda memang, kalo *thrift* bisa *ki* dapat yang bagus dengan harga murah. Kalau *local pride* (yang pernah kubeli), baru beberapa bulan sudah kubeli langsung pudar warnanya, baru jahitannya lepas-lepas," tuturnya.

Sejalan dengan *trend thrift* yang melonjak, memasuki bangku kuliah Naim juga jadi lebih sering menghabiskan uangnya untuk membeli baju bekas ketimbang baju baru. Mahasiswa Jurusan Jurnalistik tersebut banyak mengeksplorasi berbagai tempat *thrift* di Makassar dan sekitarnya. Salah satunya tempat yang ia datangi kali ini, GOR Sudiang. Tempat lain yang juga kerap ia kunjungi ialah Pasar Cidu. Naim juga acap kali berhenti di beberapa tempat yang ia lalui bila melihat ada barang yang menarik perhatiannya.

Naim sebut bagian paling menyenangkan dari *thrift* ialah prosesnya. Sebab, tidak semua tumpukan baju bekas yang ada merupakan barang *branded*. Kebanyakan hanyalah pakaian tanpa merek dengan kualitas yang cukup baik. Hanya saja, bila jeli, barang



Salah satu pedagang *thrift* sedang membuka ball baju untuk dijual di Pasar Sungguminasa, Sabtu (14/12/2024). | Foto: Washilah - Desviana.

bermerek bukan mustahil untuk didapatkan.

Mendapatkan barang bagus dengan harga miring setelah melalui proses panjang bukanlah hal yang mustahil bagi Naim, beberapa kali ia mendapatkan "harta karun" dalam proses pencariannya. Seperti baju kaos *band* yang hanya ia beli seharga sepuluh ribu rupiah serta tas punggung yang ia dapatkan saban bulan.

Tas berwarna ungu dengan merek Fjallraven Kanken yang hanya dibandrol dengan harga seratus ribu rupiah. Padahal, nilai pasar tas tersebut bila dalam keadaan baru berada dikisaran satu hingga dua juta rupiah.

Thrift tidak hanya ia pandang sebagai sebuah proses pencarian yang menyenangkan, tetapi juga sebagai sebuah solusi. Selain solusi atas keinginan untuk belanja irit, *thrift* juga menjadi solusi dari permasalahan lingkungan akibat limbah pakaian. Dengan membeli pakaian bekas, menurut Naim, dirinya dapat berkontribusi mengurangi limbah pakaian yang ada. Sebab, pada dasarnya produk *thrift* mulanya ialah seabrek pakaian tak terpakai yang seharusnya dibuang entah ke belahan bumi yang mana.

Pun begitu, ia tetap saja melihat ada sisi negatif dari kecenderungan *nge-thrift* ini. Sisi negatif yang ia maksud ialah rasa ketagihan untuk terus mengulangi. Bagaimanapun, menahan diri untuk tidak mengeluarkan dana seuprit untuk barang yang disukai sulitnya bukan main.

Walaupun *nge-thrift* tampak tak ada hambatan, rupanya Naim tak luput dari sentimen orang di sekitarnya. Walau tidak banyak, beberapa orang pernah menarasikan jika dirinya sebagai "telaki barang bekas". Hanya saja, pernyataan semacam itu hanya ia balas dengan balik berguyon "Lebih mahal ini dari UKT (Uang Kuliah Tunggal) mu."

Di luar itu, tidak sedikit pula rekan Naim yang menjadikannya sebagai *thrift man*. Sebagai seseorang yang nantinya akan jadi penyedia layanan jasa titip. Rekannya akan menyebut model maupun merek pakaian, lalu Naim akan membantu mencari dan menemukan barang yang dimaksud.

Selain Naim, salah satu maha-

siswa Jurusan Sosiologi Agama, Muflih Hidayat juga tergerus udara *trend thrift*. Bedanya, Muflih baru belakangan mencoba *nyemplung* ke barang-barang bekas. Pembelian pertamanya ialah sebuah sepatu sneakers yang ia dapatkan dari penjual di sepanjang jalan depan Pertamina Aroepala.

Saat itu, Muflih tidak mengira jika sepasang sepatu—yang lecehnya tidak seberapa itu—yang berada di genggamannya punya harga "di luar nalar." Sembilan puluh ribu rupiah. Bagi Muflih yang dulu kerap menghamburkan uang demi sepatu dengan harga lima kali lipat, tentu harga yang diberi sang pedagang sangat menggiurkan. Tanpa pikir panjang, sepatu bermerek Puma tersebut ia bungkus pulang. Sejak saat itu, Muflih jadi lebih dekat dengan pasar barang bekas ketimbang mall ataupun *online shop*.

Terkait sentimen mengenakan barang bekas, Muflih justru mengaku tidak mengalami hal yang berarti. Justru ia kerap mendapat reaksi, "oh barang bekas itu kah? Kayak baru saya lihat," dari rekan-rekan di sekitarnya.

Kesenangan tersendiri yang Muflih dapatkan dari berbelanja barang bekas, ialah bahwa pakaian ataupun sepatu yang ia beli akan sangat sulit dipakai oleh orang yang berbeda. Sebab jumlah barang bekas dengan model yang sama persis sangat jarang ditemui.

"Soalnya saya tidak suka kalau yang kupakai ada sama atau *couple*-nya," pungkasnya.

*Penulis: Fitria Alfaningsih/
Yuyun Wahyuni
*Editor: Saldi Adrian



Jejeran baju *thrift* dengan motif yang beranekaragam. | Foto: Washilah - Desviana

Nama Baik Naik Setinggi Langit, Lalu Jatuh Setumit

Oleh: Rahmat Rizki

Bagai api dalam sekam. Pencetakan uang palsu yang terjadi di Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar tak sekalipun pernah dibayangkan akan terjadi. Sebagaimana perpustakaan, pusat berbagai pengetahuan berkumpul, berbentuk buku dan semacamnya.

Pencetakan uang palsu yang menetapkan Ketua UPT Perpustakaan UIN Alauddin, Andi Ibrahim sebagai tersangka, benar adanya. Tak pelak, mesin cetak uang palsu dan beberapa barang bukti lainnya, ditemukan di dalam perpustakaan, termasuk uang palsu senilai ratusan juta.

Dengan gelar doktor dan sederet rekam jejaknya sebagai akademis, tak membuat Andi Ibrahim menjadi patuh pada pengetahuan dan kejujuran. Sebaliknya, tindakan kriminal ia selundupkan pada sebuah lorong toilet di lantai 1 perpustakaan, membentuk ruangan mencetak uang palsu yang kedap suara.

Di dalam ruangan rahasia itu, sebuah mesin cetak seharga Rp 600 juta telah diendapkan sejak September 2024. Namun, seperti peribahasa yang umum diketahui, “sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga.” Begitu pula dengan yang tersembunyi di perpustakaan UIN Alauddin. Akhirnya terbongkar juga.

Musabab itu, “pabrik uang palsu”

standar tertinggi pengelolaan perpustakaan, yang tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor: PPM.02/745/2024. Akreditasi A tersebut berlaku mulai 7 Maret 2024 hingga 7 Maret 2029.

Tertatih Meraih Akreditasi

Jauh sebelum menyalah akreditasi A, perpustakaan pernah mengalami masa-masa sulitnya. Dari tak punya tempat, kebakaran, hingga kurangnya anggaran.

Mulanya, Perpustakaan UIN Alauddin bernama Perpustakaan IAIN Alauddin Makassar yang didirikan pada 10 November 1965, bersamaan dengan peresmian Kampus IAIN Alauddin Makassar, yang bertempat di Jl. Kakatua, Makassar.

Kemudian pada Tahun 1967-1974, Perpustakaan IAIN sempat berpindah tempat sebanyak tiga kali hingga akhirnya menetap di Jl. Sultan Alauddin dan menempati lantai dua gedung Fakultas Syariah.

Nahasnya, pada tahun 1975 perpustakaan mengalami kebakaran sehingga harus dipindahkan ke gedung Fakultas Tarbiyah, yang bersambung dengan ruangan Lembaga Pusat Bahasa.

Setelahnya, perpustakaan terus mengalami perubahan. Paling seringnya adalah perpindahan tempat. Pasalnya, perpustakaan belum memiliki gedung permanen. Sehingga di Tahun 2004, Perpustakaan IAIN Alauddin kembali beralih tempat ke bekas gedung Pasca Sarjana.

Meski seringkali berpindah tempat, perpustakaan tetap berusaha melakukan peningkatan dalam pelayanan dan sistemnya. Pada Tahun 2009, sistem layanan konvensional bertransformasi ke otomasi, menggunakan

Electronic Library Management System (ELiMS).

Perpustakaan kembali lagi berpindah tempat pada Tahun 2011, bersamaan dengan berpindahnya kampus ke Samata, Gowa, setelah hampir enam tahun berubah status menjadi UIN Alauddin. Karena itu pula, perpustakaan kemudian resmi disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan UIN Alauddin.

Sejak Tahun 1965 hingga 2015, perpustakaan telah beberapa kali berganti nahkoda. Dari Syamsuddin, Nursiah Hamid, lalu Irvan Mulyadi yang mengepalari sejak 2009 sampai 2013, kemudian dilanjutkan oleh Himayah pada 2013 sampai 2015.

Kepala UPT Perpustakaan berikutnya ialah Prof Quraisy yang diangkat pada September 2015 lalu. Sejak ia menjabat, Perpustakaan UIN Alauddin perlahan berkembang sebagaimana yang diharapkan, menjadi “Destinasi Wisata Akademik,” bahkan meraih bermacam penghargaan.

Dimulai dengan merenovasi penampilan perpustakaan, seperti plafon, penataan meja-kursi, hingga penamaan perpustakaan menjadi UPT Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar.

Selain peningkatan fasilitas, serangkaian terobosan juga dilakukan oleh Prof Quraisy. Salah satunya adalah membuat Kafe dan Bioskop di dalam perpustakaan. Hal tersebut ia lakukan dengan membaca kebutuhan mahasiswa zaman sekarang, agar mahasiswa mempunyai minat untuk selalu berkunjung ke perpustakaan. Sebab menurutnya, meningkatkan minat kunjung menjadi lebih penting ketimbang minat baca.

Bahkan, Prof Quraisy pernah berencana membangun aquarium raksasa di dalam perpustakaan demi menggaet banyak pengunjung, nahasnya rencana itu gagal karena tak didukung anggaran.

Meski begitu, dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan, Perpustakaan UIN Alauddin pada kemudian hari menuai beragam pujian. Termasuk meraih prestasi sebagai perpustakaan terakreditasi A pertama di luar Pulau Jawa, pada Oktober 2018 lalu.

Pada Tahun 2019, Ketua UPT Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin berpindah ke tangan Hildawati Almah. Bertepatan dengan itu, Covid-19 mulai merajalela, membekukan segala aktivitas termasuk kegiatan di UIN Alauddin Makassar.

Akibatnya, perpustakaan ditutup, anggaran pun turut menciut. Menciutnya anggaran berdampak pada

fasilitas perpustakaan yang tidak mendapat perbaikan di masa itu. Aktivitas di kafe dan bioskop perpustakaan juga ikut diberhentikan yang berlanjut sampai sekarang.

Untuk mengantisipasi berhentinya kunjungan pembaca, Perpustakaan kemudian memfokuskan pelayanan melalui *ebooks* yang dapat diakses oleh seluruh sivitas kampus. Koleksi *ebooks* terus ditambah hingga mempunyai 1.746 koleksi. Bahkan selama masa pandemi, pendaftar terus bertambah, baik dari pihak mahasiswa maupun dosen.

Saat pandemi telah usai dan aktivitas kampus kembali pulih, Hilda mendapati perkara baru, yakni jumlah pengunjung perpustakaan yang menurun drastis dari tahun-tahun sebelum pandemi. Meski begitu, Hilda terus mengusahakan peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan. Sebab ia tahu, hanya soal waktu sampai pengunjung kembali menganggap bahwa wujud perpustakaan bukan hanya di ponsel saja.

Pada September 2023, masa jabatan sebagai Kepala UPT Perpustakaan Syekh Yusuf sudah usai. Hildawati Almah kemudian diganti oleh Andi Ibrahim.

Andi Ibrahim dianggap kompeten mengampu jabatan tersebut. Bagaimana tidak, rekam jejaknya di bidang manajemen literasi dan perpustakaan sudah malang melintang. Latar belakang pendidikan apalagi; Sarjana Agama di UIN Alauddin, Sarjana Sastra di Universitas Indonesia (UI), S2 di Universitas Negeri Malang, dan gelar doktoralnya di UIN Alauddin Makassar.

Andi Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik. Ia kerap mengisi beberapa seminar nasional dan pelatihan. Salah satunya dalam Workshop Re-Akreditasi perpustakaan yang digelar di Samarinda, awal Juli 2024.

Maka tak heran saat Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia memberikan penilaian gemilang untuk Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar, pada 7 Maret 2024 lalu.

Sesaat setelah perpustakaan meraih akreditasi A, Andi Ibrahim menganggap bahwa prestasi tersebut merupakan bukti dedikasinya dalam memberikan layanan terbaik kepada sivitas akademika, juga bukti kapasitasnya sebagai ketua UPT Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin.

Api dalam Sekam

Prestasi perpustakaan yang digalakkan Andi Ibrahim seolah sirna seketika, setelah kasus pencetakan uang palsu yang ia lakukan di dalam gedung Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar, terbongkar.

Andi Ibrahim ditangkap polisi pada Jumat 6 Desember kemarin. Ia menjadi salah satu dari 17 tersangka atas kasus pemalsuan uang.

Bagai terjun bebas tanpa parasut. Dulu diusahakan agar menjadi pusat peradaban, kini jadi tempat diproduksi kejahatan.

**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar*

kemudian dikait-kaitkan pada perpustakaan UIN Alauddin.

Pupus sudah citra perpustakaan dari kampus peradaban.

Padahal, Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin, belum lama ini kembali meraih akreditasi unggul oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, pada 7 Maret 2024 lalu—enam bulan sebelum mesin cetak uang palsu datang. Prestasi tersebut diraih setelah tim Asesor melakukan proses visitasi pada Januari 2024. Setelahnya, Perpustakaan UIN Alauddin pun diakui telah memenuhi

Jadi Asa atau Petaka?

Oleh: **Nadhilla Putri Hasir**

“Segala sesuatu yang menjadi atau berubah pasti terjadi karena suatu sebab; karena tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi tanpa sebab,” cetus Plato.

Pemikiran filsuf Yunani ini membuka mata kita bahwa segala hal, baik yang kecil maupun besar, memiliki akar penyebab. Dalam kehidupan, hukum kausalitas ini menjadi benang merah yang menjalin setiap peristiwa, menciptakan hubungan sebab dan akibat yang saling berkesinambungan.

Dalam konteks kehidupan mahasiswa, terutama di perguruan tinggi, peran sebagai *agent of change* seringkali mendorong individu untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap kebijakan yang dibuat pemangku kepentingan. Tanpa nalar kritis, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan kehilangan daya dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan.

Di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, dinamika kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme penyampaian aspirasi menjadi perhatian utama mahasiswa. Surat Edaran (SE) 2591 yang sebelumnya mengatur mekanisme tersebut, kini telah bergeser ke SE 3652. Meski tujuannya diklaim untuk mengakomodasi aspirasi secara lebih terstruktur dan berkarakter, kebijakan ini justru menimbulkan tanda tanya besar: Mengapa dan apa implikasi kebijakan baru ini terhadap kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat?

Jika sebuah kampus mengatur kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa, hal itu berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan UU No. 9 Tahun 1998. Sebagai institusi pendidikan, kampus seharusnya menjadi ruang yang paling terbuka untuk kebebasan berekspresi, berserikat, dan berdiskusi. Mahasiswa adalah agen perubahan yang membutuhkan ruang untuk berpikir kritis dan menyuarakan aspirasi tanpa takut dikekang oleh regulasi yang berlebihan.

Mengatur kebijakan untuk memastikan tata tertib memang penting, tetapi jika kebijakan itu berubah menjadi pembatasan, maka hal ini tidak hanya melanggar hak asasi, tetapi juga melemahkan fungsi pendidikan tinggi sebagai penjaga demokrasi. Kampus seharusnya tidak menamatkan budaya “takut berbicara,” karena kebebasan berpendapat adalah fondasi dari inovasi, pemikiran kritis, dan kemajuan masyarakat.

Selain itu, pembatasan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kontrol terhadap mahasiswa untuk menjaga citra kampus atau kepentingan pihak tertentu, seperti pemerintah atau korporasi. Padahal, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan jelas memberikan hak kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi atau unjuk rasa sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Kampus yang membatasi kebebasan berpendapat seolah-olah lupa pada misi utamanya: mencetak generasi yang berani berpikir kritis dan berkontribusi pada perubahan sosial. Justru, jika mahasiswa dihalangi untuk bersuara, dampaknya akan merusak nilai-nilai demokrasi dan merampas hak fundamental mereka sebagai warga negara.

Sejak dulu, mahasiswa dikenal sebagai kekuatan sosial yang berpengaruh. Berbagai perubahan besar, baik di tingkat nasional maupun global, kerap diawali oleh suara kritis maha-

siswa. Di Indonesia sendiri, gerakan mahasiswa memiliki jejak historis yang kuat, mulai dari era reformasi hingga isu-isu kontemporer terkait lingkungan, kebijakan pendidikan, hingga keadilan sosial.

Contohnya, demonstrasi mahasiswa pada 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh negeri turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan mengakhiri rezim orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Dampaknya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi presiden.

Urgensi kebebasan berekspresi berdasarkan demonstrasi mahasiswa pada 1998 sangat jelas dan penting karena menunjukkan bagaimana kebebasan ini berperan sebagai katalisator dalam menciptakan perubahan sosial dan politik yang signifikan.

Demonstrasi yang terjadi pada 1998 terjadi karena adanya penindasan, ketimpangan, dan krisis multidimensi yang tidak mendapatkan respons efektif dari pemerintah. Kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan. Tanpa kebebasan ini, kritik terhadap pemerintah tidak mungkin muncul secara kolektif dan terorganisasi.

Namun, dalam realitas saat ini, ruang gerak mahasiswa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan tersebut adalah pembatasan kebebasan berekspresi melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus.

Kebijakan pemerintah yang membatasi demonstrasi adalah tampanan keras bagi demokrasi dan penghinaan terhadap rakyat yang mencoba bersuara. Ketika demonstrasi dibatasi, pemerintah pada dasarnya sedang menyatakan bahwa mereka lebih peduli pada citra mereka daripada menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Bukankah negara ini dibangun di atas prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat? Jika suara rakyat dibungkam, maka pemerintah sedang melupakan siapa yang sebenarnya mereka wakili.

Pembatasan demonstrasi sering kali dikemas dengan alasan keamanan atau ketertiban, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk menghindari tanggung jawab dan kritik. Pemerintah yang percaya diri dengan kebijakannya tidak akan takut pada protes, melainkan justru akan mendengarkannya untuk memperbaiki diri. Namun, jika mereka memilih untuk membungkam, itu hanya menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan.

Rakyat tidak turun ke jalan untuk bersenang-senang; mereka melakukannya karena saluran formal telah gagal atau tidak cukup efektif. Dengan membatasi demonstrasi, pemerintah tidak hanya mengabaikan aspirasi rakyat, tetapi juga mendorong ketidakpuasan menjadi bara yang suatu saat bisa menyala lebih besar. Bukannya menciptakan solusi, kebijakan ini justru memperdalam jurang antara pemerintah dan masyarakat, yang dalam jangka panjang bisa merusak stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

Alih-Alih Dihapuskan Malah ‘Dihaluskan’

Plato mengajarkan kita bahwa setiap perubahan, termasuk dalam dunia

kebijakan, pasti memiliki sebab yang mendahului dan dampak yang mengikutinya. Dalam konteks SE 3652, pergantian ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang lebih besar, yaitu ambisi UIN Alauddin untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Kebijakan pembatasan berpendapat dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berpotensi saling mendukung untuk mengekang kebebasan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang kritis. PTN-BH, dengan otonomi finansial dan akademiknya, sering kali dituntut memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan pemerintah atau korporasi. Kebijakan ini, jika dikombinasikan dengan pembatasan berpendapat, menciptakan situasi di mana kampus bukan lagi menjadi ruang bebas untuk diskusi dan gerakan sosial, melainkan sekadar “mesin” untuk mencetak tenaga kerja tanpa ruang untuk berpikir kritis.

Dalam narasi konspirasi ini, pembatasan berpendapat dianggap sebagai cara untuk menekan potensi perlawanan dari kelompok mahasiswa, yang sering menjadi garda terdepan dalam protes sosial. PTN-BH, yang lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan, dianggap memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan institusi dengan menghindari label “sarang pemberontak.” Dengan demikian, mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atau arah pendidikan tinggi dianggap sebagai ancaman.

Lebih jauh, otonomi PTN-BH sering diartikan sebagai upaya melemahkan kontrol publik terhadap kampus. Jika kebebasan berpendapat dibatasi, mahasiswa kehilangan saluran untuk mengkritik isu-isu seperti kenaikan biaya kuliah, komersialisasi pendidikan, atau hubungan kampus dengan pihak-pihak berkepentingan. Konspirasi ini menyiratkan bahwa pemerintah dan PTN-BH berkolaborasi untuk mengubah kampus menjadi tempat yang steril dari kritik politik, memastikan kontrol penuh atas narasi dan menjaga stabilitas kepentingan elite.

Jika benar demikian, maka kebijakan ini bukan hanya melukai demokrasi, tetapi juga menghancurkan fondasi pendidikan tinggi sebagai ruang untuk berpikir bebas, berinovasi, dan memperjuangkan keadilan sosial.

PTN-BH memiliki tingkatan tertinggi dalam hal otonomi, baik dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, maupun akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Pasal 3, salah satu syarat untuk menjadi PTN-BH adalah menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP). Dokumen ini mencakup penyelenggaraan dan pengembangan akademik, termasuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menekankan pada kebebasan akademik.

Namun, di balik klaim kebebasan akademik, terdapat tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara otonomi dan pengawasan. SE 3652, dengan segala aturan yang melekat padanya, bisa dianggap sebagai respons untuk memenuhi prasyarat menuju PTN-BH sekaligus menata ulang mekanisme penyampaian aspirasi mahasiswa. Dalam teori Plato, kebijakan ini mungkin dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan (*order from chaos*). Tetapi apakah keteraturan ini benar-benar memberi ruang bagi kebebasan, atau justru mempersempitnya?

Jika dilihat dari sudut pandang birokrasi, SE 3652 bertujuan memas-

takan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa dilakukan dengan cara yang damai, intelektual, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta visi dan misi UIN Alauddin. Secara ideal, ini adalah langkah positif untuk menciptakan harmoni antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru menjadi alat untuk membungkam suara-suara kritis.

Transformasi kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang regulasi di tingkat nasional. Dalam Pasal 2 Poin b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014, dinyatakan bahwa PTN-BH harus memiliki relevansi antara visi, misi, dan tujuan institusi dengan standar pendidikan tinggi. Ini termasuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Dalam kerangka ini, SE 3652 dapat dipahami sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa UIN Alauddin memiliki mekanisme yang terstruktur dan sesuai standar dalam mengelola aspirasi mahasiswa.

Namun, dalam prakteknya, apakah kebijakan ini benar-benar mendukung kebebasan berekspresi? Atau justru menjadi alat kontrol yang mengarah pada pembatasan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika melihat realitas di lapangan, di mana mahasiswa sering merasa kesulitan untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

Otonomi yang dimiliki PTN-BH memang memungkinkan perguruan tinggi untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya. Namun, dengan otonomi ini juga muncul risiko bahwa kebijakan kampus lebih berorientasi pada kepentingan institusi daripada kebutuhan mahasiswa. Dalam konteks SE 3652, ada kekhawatiran bahwa aturan ini digunakan untuk memastikan stabilitas institusi, tetapi mengorbankan kebebasan mahasiswa.

Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah bagian penting dari pencarian kebenaran. Dalam tradisi pendidikan Islam sendiri, kebebasan akademik menjadi landasan penting untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang membatasi kebebasan mahasiswa harus dikaji ulang, agar tidak menghilangkan esensi dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Perubahan kebijakan dari SE 2591 ke SE 3652 adalah cerminan dari proses transformasi yang sedang berlangsung di UIN Alauddin. Sebagai institusi yang bercita-cita menjadi PTN-BH, UIN Alauddin perlu menunjukkan komitmen terhadap standar pendidikan tinggi yang bermutu, termasuk dalam hal kebebasan mimbar akademik. Namun, transformasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak merugikan mahasiswa sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.

Dalam proses ini, peran mahasiswa sebagai *agent of change* tidak boleh diabaikan. Mahasiswa harus terus mendorong dialog kritis dan konstruktif dengan pihak kampus, untuk

memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mendukung kepentingan bersama. Sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa, mahasiswa UIN Alauddin harus mengambil peran aktif dalam proses transformasi ini.

Dalam kerangka hukum kausalitas Plato, perubahan yang terjadi di UIN Alauddin adalah hasil dari rangkaian sebab yang saling terkait. Namun, dampak dari perubahan ini tidak hanya tergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana semua pihak, termasuk mahasiswa, berperan dalam mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang positif.

Seperti yang diajarkan Plato, setiap perubahan memiliki sebab dan dampak, dan tugas kita sebagai bagian dari perubahan adalah memastikan bahwa dampak yang dihasilkan membawa kebaikan bersama. Dalam konteks UIN Alauddin, kebijakan SE 3652 harus dilihat sebagai langkah awal menuju transformasi yang lebih besar. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh komitmen semua pihak untuk menjaga nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab.

Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan semangat kebebasan akademik dan keislaman yang menjadi landasan UIN Alauddin. Dengan berpikir kritis dan bertindak bijaksana, kita dapat menjadi bagian dari perubahan yang membawa kemajuan, bukan hanya bagi kampus, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.



*Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

ABC Anarkisme

Oleh: Abab

"Saya percaya bahwa anarkisme adalah hal yang paling bagus dan terbesar yang pernah dipikirkan oleh manusia; satu-satunya yang dapat memberi anda kebebasan dan kesejahteraan, serta membawa perdamaian dan kegembiraan di dunia."

Begitu yang disebutkan Alexander Berkman pada pendahuluan di buku yang ia tulis—ABC Anarkisme; Anarkisme untuk Pemula. Sebuah panduan untuk mengenal apa itu "anarkisme."

Tak pelak bahwa setelah sedetik, dua detik atau lebih, kepalamu akan mengelak dengan yang disampaikan Alex tentang anarkisme. Iya, kepalamu akan mengadili kata-kata itu dengan hujaman yang sebenarnya bodoh. Jika saya benar, maka kau sedang memikirkan anarkisme atau anarkis sebagai perbuatan brutal dan bengis. Penghancuran dan kekacauan.

Sebab saya pun sama. Mengartikannya serupa yang sekarang kau pikirkan dalam kepalamu. Bermodal okehan dan klaim orang-orang bahwa anarkis itu tindakan brutal, juga dengan yang diartikan Pusat Kamus Bahasa sebagai dilakukan yang menjatuhkan, menghina, atau menyerang kehormatan bermarwah. Ditambah juga dengan yang dituliskan para wartawan dalam beritanya, tentang demonstrasi yang berakhir anarkis: kacau.

Kau sama sekali tidak salah, namun tidak pula menjadi benar, kawan. Barangkali anggapan itu karena kau belum mengenalinya lebih jauh, seperti juga saat kau atau saya mendengarkan kisah polisi di waktu kecil. Kala kita membanggakan instansi tersebut tanpa cela dan ingin suatu saat ketika besar menjadi bagian dari polisi.

Kebenaran tentang polisi dan bagaimana mereka bekerja kemudian terkuak ketika kita beranjak dewasa, bahwa ternyata, instansi yang saya dan kau banggakan, adalah mesin pembunuh, pelaku kekerasan dan kekejaman.

Sebaliknya, anarkisme adalah apa yang kita anggap buruk sedari awam. Kita tak paham sama sekali. Hanya ikut-ikutan. Mengaminkan apa yang dikatakan banyak orang bahwa anarkis adalah perilaku membabi buta dan semacamnya. Namun ternyata tidak demikian. Anarkisme adalah sebuah terobosan berpikir, cara hidup dan pendirian politik yang suci.

Apakah sekarang kau sedang bertanya-tanya mengenai anarkisme yang saya sebut suci itu? Sabar, kawan. Jangan terburu-buru. Akan saya sampaikan pikiran Alex dengan hati-hati, sebab "anarkisme memiliki banyak musuh."

Politisi, polisi, instansi hingga konstitusi "tidak akan berbicara dengan jujur kepadamu mengenai anarkisme. Kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai hal itu dan membencinya."

"Surat kabar, terbitan-terbitan, televisi, orang terpelajar, pers, kapitalis; semua menentang anarkisme."

"Saya mesti mengatakan kepada anda, apa yang bukan anarkisme." Dalam bukunya, Alex akan membimbingmu mengenai apa yang salah dan benar tentang anarkisme, dengan pengertian yang sederhana. Sangat sederhana bahkan untuk anak TK.

Pertama, "anarkisme bukan bom, ketidakteraturan atau kekacauan." Bukan pula perampokan dan pembunuhan. Bukan sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua. Tidak juga kembali ke barbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari semua itu.

"Anarkisme memiliki arti bahwa anda harus bebas."

Tidak siapapun dapat memperbudakmu, menjadi majikanmu, memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Tidak ada komando, seperti yang diterapkan para tentara dan polisi. Tidak ada yang berkuasa hingga bisa membuatmu tunduk atas titahnya.

Kau memiliki hak untuk menentukan jenis kehidupan yang kau mau. Demikian juga kawan di sebelahmu, memiliki kebebasan yang sama denganmu. Bahwa setiap orang harus memiliki hak-hak dan kebebasan yang sama. Semua orang bersaudara. Hidup bersaudara dalam perdamaian dan harmoni.

Tidak boleh ada perang, tidak boleh ada kekerasan yang digunakan oleh sekelompok orang kepada lainnya, tidak boleh ada monopoli, dan tidak boleh ada kemiskinan, tidak

boleh ada penindasan, tidak boleh ada pengambilan keuntungan dari kawan anda.

Saat terjerembab dalam kata-kata itu, saat membaca buku kawan Alex pada poin pendahuluan, Alex tahu kau pasti akan bertanya-tanya setelahnya. Kau akan bertanya, "mungkinkah hal seperti itu dapat terjadi? Bagaimana caranya?"

"Baiklah, mari kita bicarakan hal itu. Mungkin saya dapat menunjukkan kepada anda bahwa kita dapat menjadi baik dan hidup sebagai orang baik bahkan tanpa harus menumbuhkan sayap."

Tak payah menanti menjadi malaikat. Akan sangat mungkin hal tersebut terjadi. Alex percaya dengan itu. Dan selamat, kau telah menyelesaikan bagian 'Pendahuluan' dari buku ABC Anarkisme. Kau tidak perlu risau membuka rujukan manapun, riset, penelitian, tumpukan buku. Hanya dirimu saja, sebagai manusia.

Selanjutnya, kawan Alex akan menjelaskan padamu tentang anarkisme yang lumrah dikaitkan dengan kata "kekerasan." Sebelumnya kau telah membaca, bahwa anarkisme bukanlah bom, kekacauan atau kekerasan. Lalu anarkisme itu sebenarnya apa dan bagaimana?

Alex dengan jujur dan terang-terangan akan memberitahukannya kepadamu. Sebab Alex adalah seorang anarkis. Sebab Alex telah akrab akan tuduhan pelaku kekerasan dan penghancuran. Tuduhan yang tidak-tidak. Tuduhan yang *sottanya* minta ampun.

Alex menjawab, "ya, kaum anarkis pernah melempar bom dan kadang-kadang mengambil jalan kekerasan."

Berspekulasikan sebegini mu. Bila kejujuran itu kau yakini sebagai apa yang selama ini melekat pada orang banyak tentang anarkisme. Tetapi, saya ingatkan, jangan terburu-buru, kawan. Bila kaum anarkis kadang-kadang menggunakan kekerasan apakah itu harus berarti bahwa anarkisme adalah kekerasan?

Barangkali kau akan berpikir seperti ini, lalu bagaimana bila di suatu masa penjajah dari tanah antah berantah datang dan menguasai tanah airmu. Kau atau seperti yang diceritakan nenek moyang kita di nusantara dahulu, mereka akan memegang bambu runcing atau golok dan menggunakan kekerasan untuk mengusir penjajah. Apakah penolakan atas penjajahan itu dapat diartikan sebagai kekerasan?

Apakah Sultan Hasanuddin yang diceritakan dengan gagah berani mengusir penjajah, yang bukan tidak mungkin telah menancapkan badik, tombak atau apapun itu kepada penjajah yang membuatnya terkapar merengang nyawa adalah sebagai pembunuh?

Bagaimana dengan pahlawan-pahlawan lainnya yang tercatat dalam sejarah bangsa kita sebagai pembela tanah air? Pembunuhkah juga mereka? Atau barangkali di antara banyaknya pahlawan, terdapat kakek atau nenekmu yang berlaku sama terhadap penjajah, lalu saya menganggapmu sebagai keturunan pembunuh? Apakah kau marah? Pasti!

Di setiap daerah, setiap zaman, selalu terdapat pembunuh para penjajah atau tiran, yaitu laki-laki dan perempuan yang mencintai negeri mereka sehingga rela mengorbankan hidup mereka untuk mempertahankan hal itu. Banyak contoh pada kejadian-kejadian lampau yang dikenal heroik.

Termasuk para tentara dengan senjatanya, yang tak segan meletuskan pelurunya kepada yang dianggap mengancam keutuhan negara. Apakah semua contoh tadi dan banyak lagi yang sedang kau pikirkan adalah anarkis? Tidak! Mereka barangkali hanyalah republikan, monarkis, loyalis,

agamis, demokratis, nasionalis, nihilis, patriotis bahkan teroris. Mereka bukan anarkis.

"Anarkisme adalah perdamaian dan harmoni, tentang non-penjajahan, tentang kesucian hidup dan kebebasan. Tetapi para anarkis adalah manusia, seperti manusia yang lainnya, dan mungkin lebih."

Alex mengartikan anarkis sebagai orang-orang yang lebih sensitif terhadap kemungkar dan ketidakadilan, lebih cepat marah terhadap penindasan, sehingga mereka terkadang menyuarakan protes dengan tindakan kekerasan. Tindakan tersebut adalah sebuah ekspresi dari temperamen individu, dan bukan suatu teori atau pedoman yang perlu dilakukan sebagai kaum anarkis.

Namun tak dapat pula dinafikkan bahwa dalam beberapa waktu lalu, banyak orang anarkis yang mempercayai kekerasan sebagai sebuah alat untuk propaganda. Hal itu dikenal sebagai "propaganda dengan perbuatan." Tindakan seperti itu digunakan untuk memberikan ketakutan terhadap musuh (pemerintah, kapitalis dll), dan juga untuk menarik perhatian terhadap kejahatan yang dituju oleh tindakan teror tersebut.

Tetapi kebanyakan penganut anarkis sekarang tidak lagi mempercayai "propaganda dengan perbuatan" dan tidak menyukai cara-cara seperti itu.

"Kondisi kehidupan modern membuat hal itu menjadi tidak penting dan bahkan membahayakan penyebaran ide-ide mereka. Tetapi ide-ide mereka masih tetap sama, yang berarti bahwa bukan anarkisme yang membentuk sikap mereka terhadap kekerasan."

Tetapi bukankah semua orang mempercayai penggunaan kekerasan dalam segala macam konteksnya, dan akan mempraktekkannya kalau perlu, meski di satu sisi lain akan mengutuk tindakan kekerasan apabila hal itu dilakukan oleh orang lain.

Kekerasan bukan hanya diyakini oleh individu, melainkan juga oleh institusi yang kita dukung. Pemerintah dan segala macam kata gantinya. Maka tak salah jika diartikan sebagai kekerasan yang terorganisir?

Hukum yang diciptakan pemerintah, sekalipun dialihnya atas nama rakyat, memerintahkan kita untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu, dan apabila kita tidak menaatinya, kita akan dipaksa dengan kekerasan—kata halusnya yang acap kali digunakan oleh aparat negara adalah pendiplinan. Tai kucing sekali, bukan?

Lalu mengapa hanya kaum anarkis yang dituding bengis? Padahal, selama ini kita hidup dalam kekerasan. Semasa kanak-kanak, kita ditundukkan lewat kekerasan oleh orang tua dan orang-orang yang lebih tua. Di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, pabrik, sawah atau toko, selalu terdapat otoritas orang lain yang terus membuat kita patuh dan memaksa kita melakukan keinginannya.

"Hak untuk memaksa anda itu disebut otoritas. Ketakutan akan hukuman telah dijadikan tugas dan disebut ketaatan."

Kebiasaan kita memakan, menelan, menghirupnya tanpa henti membuat kita membenarkannya, lalu mengartikannya sebagai hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Kita hanya membenarkannya dengan 'legal' atau tidak. Jika hukum telah melegalkannya, maka kita akan siap melakukannya dengan tanpa merasa berdosa.

Lalu dimana letak masalahnya? Tentu bukan pada kekerasan, bukan pula anarkisme! Melainkan kepada orang yang menggunakan kekerasan secara "ilegal."

Masalahnya, 'legal' dan 'ilegal' telah sedari lama dikontrol oleh otoritas yang dekat dengan kita, orang

tua, agama atau ketuhanan, politik, ekonomi, sosial dan moral. Kita takut kepada Tuhan dan setan, kepada ulama dan tetangga, kepada pimpinan-ketua, kepada politisi dan polisi, kepada hakim dan sipir penjara, kepada hukum dan pemerintah.

Sebagai penutup bagian kedua, saya akan mengutip kesekian kalinya lagi kata-kata kawan Alex dalam bukunya ini, "anarkisme adalah sebuah masyarakat tanpa kekuasaan dan pemaksaan, di mana semua harus sama; dan hidup di dalam kebebasan, kedamaian dan harmoni."

Sebab kata anarki datang dari Yunani, yang berarti tanpa kekuatan, tanpa kekerasan atau pemerintah, karena pemerintah adalah sumber dari kekerasan, pembatasan dan koersi (pemaksaan dan kekerasan).

"Utopis sekali, bukan?" Tidak mengherankan jika satu di antara kau akan bilang seperti itu. "Bukankah ini terlalu ilusi, pemikiran orang mabuk yang berhalusinasi?" Katamu lagi, dengan penekanan yang lebih meyakinkan.

Maka jadilah malaikat. Tumbuhkanlah sayap pada punggung rapuhmu itu. Bukannya, bayangan tentang malaikat adalah ciptaan yang kita buat sendiri. Barangkali manusia malaikat memang ada, namun tidak dalam pengertian yang usang, seperti punya sayap dan bercahaya.

Tentukanlah Sendiri!

Tentang bagaimana anarkisme bekerja, itu akan lebih jauh lagi. Masih banyak bagian dalam buku ini yang enggan saya jelaskan setengah-setengah. Sebab saya tidaklah ahli dalam merangkai penjelasan dengan kata seuprit dan berharap pembaca memahaminya dengan terang.

Tidak! Saya bukanlah siapa-siapa. Maka tugasmu selanjutnya adalah membacanya. Buku ini tersedia di ponselmu, gratis. Kau bisa mengaksesnya di internet. Tersedia, sekali lagi dengan gratis. Tanpa biaya. Atau jika kau jenis manusia yang tak suka membaca lewat layar monitor, maka kau perlu tindakan eksklusif, mengeluarkan sedikit uang di sakumu dan mencarinya di toko online yang ada di ponselmu.

Kau sama sekali tidak akan berdosa jika membaca buku ABC Anarkisme dalam bentuk fotokopian, tidak berkualitas sama sekali, menurutmu. Sebab Alex menginginkannya demikian, sekalipun ia dalam kondisi yang miskin dan hampir mati, namun tulisannya sama sekali bukan untuk profit semata. "Hak cipta bebas dan merdeka."

"Setiap makhluk dianjurkan dan dinasehatkan untuk mengkopinya. Mencegah mengandakan, menyebar isi serta materi-materi di dalamnya."

Testimoni Singkat

Sebagai seseorang yang naif, saya menemukan diri saya begitu hina di belantara kata yang dituliskan Alexander Berkman. Saya menyadari betapa beratnya kata 'belajar.' Satu kata yang sering kita dengarkan sehari-hari, tapi kehilangan maknanya. Pada momen itu, saya sadar betapa sulit melakukannya, apalagi dengan orang-orang yang merasa dirinya tahu. Sehingga, saya mengakui bahwa masih sangat perlu bagi saya untuk belajar.

Baca ko! Biar tidak jadi tai kucing!

**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar*



Ilustrasi: Washilah - Andi Muh Saleh

Bukan Penjual Lelucon

Oleh: **Nadhilla Putri Hasir**

Matahari menyengat di langit biru, memancarkan panas yang terik ke bawah. Jalanan dipenuhi dengan deretan mobil yang tak bergerak diselingi suara klakson saling bersahutan terdengar dari semua arah. Mimik ketegangan dan frustrasi para pengemudi kian terpatrit sebab kendaraan roda dua dan roda empat itu sama sekali tak beranjak dari tempatnya. Kepulan asap hitam dari knalpot memenuhi udara kian menambah kekesalan. Namun, di tengah kekacauan itu lain halnya dengan satu siluet ini, ia tengah berlempak-lempok menawarkan keceriaan. Pakaian bercorak polkadot merah dan jingga, rambut kribu berwarna pelangi dan topeng putih menghiasi wajah dengan tambahan aksesoris seperti bola kecil berwarna merah di ujungnya. Benar, itu badut.

"Ikko sudah dulu itu, nak. Kita makan dulu,"

Teriakan lelaki paruh baya itu berhasil mengambil atensi Ikko yang tengah memainkan perannya. Melepas topeng yang ia gunakan, Ikko berjalan menghampiri suara tadi. Sampainya, Ikko kembali disuguhkan pemandangan yang cukup mengiris hati, sang bapak tengah membuka satu bungkus-kertas nasi yang kemudian dibaginya menjadi dua sisi. Sisi sebelah kiri dari kertas nasi tersebut berisi setengah nasi dengan lauk tempe diberikan untuk dirinya sedangkan sisi sebelah kanan kertas itu hanya berisikan nasi untuk sang bapak.

"Lagi-lagi bapak melakukan hal yang sama," tutur Ikko.

"Ikko bilang mau jadi seniman, menjadi seniman tentu harus sehat Ikko," ucap bapak yang sesekali mengusap puncak kepala Ikko.

Setiap kali bertanya persoalan itu, Ikko selalu mendapati jawaban yang sama. Inilah yang Ikko tidak sukai dari bapak, bapak kerap kali mengorbankan apapun demi dirinya. Jika mendebatkan hal ini, bapak pasti akan langsung beranjak dari sini sama seperti terakhir kali kami berdebat. Bapak selalu menghindari perdebatan.

Tapi, bagiku apapun santapan kita hari ini, asalkan masih ada bapak akan selalu menyenangkan.

Selain membantu bapak, kewajibanku yang lainnya adalah menuntun ilmu. Berse-ragaman putih abu-abu, pagi buta, sepeda ontel kesayangan bapak sudah kukayuh menuju sekolahku. Walaupun setir sepeda ontel milik bapak sudah oleng sana sini, entah mengapa, apapun yang berkaitan dengan bapak walaupun usang lagi-lagi selalu menyenangkan.

Tibanya, sepeda bapak kuparkirkan dan

bergegas menuju ruang kelas. Hari ini, adalah pelajaran seni budaya. Pelajaran yang paling kugemari. Aku cinta hal-hal yang berbau seni.

"Sebentar lagi kita akan memperingati hari ayah. Sekolah mau adakan pentasan. Pentasan ini akan dibuka untuk umum, jadi boleh undang keluarga kalian khususnya ayah kalian. Siapa yang berminat tampil? Ini bisa disesuaikan dengan bakatmu," tanya Ibu Sumi, guru seni budayaku.

Bisik-bisik mulai terdengar mewarnai penjurukan kelas, ada yang mulai mengajukan diri ingin menampilkan tarien 4 etnis, bernyanyi, bahkan drama musikal.

"Ibu, saya juga mau,"

Rupanya suaraku itu mencuri atensi teman-temanku.

"Hahaha, mauko tampil apa kau? Jadi badut kah?" ejek Tenri, salah satu teman kelasku yang merupakan anak yang paling disegani di kelasku.

"Nda elitnya deh,"

"Iyo astaga, bikin malu-malu,"

"Sudah, kalian semua ini betul-betul Nda tau sekali harga temannya,"

Berbagai makian itu kemudian baru terhenti ketika Ibu Sumi menyela ucapan mereka. Hal seperti itu sudah biasa bagiku, katanya karena aku merupakan anak peraih beasiswa jadi aku ditempatkan pada kasta terbawah.

"Baik, nama-nama yang tadi, saya akan setor. Jadi mulai *mi* latihan *na*,"

Pelajaran pun berakhir. Tapi pikiranku berkelana sejak diriku mengajukan diri untuk ikut berpartisipasi dalam pentasan tersebut. Bukan karena makian yang dilontarkan kawanku tadi sesaat setelah aku mengajukan diri, tetapi yang kupikirkan apakah bapak akan suka dengan penampilanku nanti.

Hari demi hari berlalu. Tak terasa, waktu yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Panggung menawan, dihiasi dengan balon warna-warni yang melayang di udara, di tengahnya bertuliskan "Selamat Hari Ayah" juga terdapat kursi besar yang dikelilingi oleh karangan bunga dan foto-foto kenangan para siswa-siswi bersama ayahnya, termasuk fotoku dengan bapak. Cahaya lampu panggung menyala lembut, menciptakan atmosfer hangat dan meriah. Di belakang panggung, terdapat orkestra yang siap memainkan lagu-lagu, sementara beberapa keluarga dan teman-teman telah berkumpul mulai memenuhi aula dimana pentasan ini dilakukan.

"Ah, dimana ini bapak? *Na* maumi dimulai," gumamku dengan sedikit khawatir kalau-kalau bapak tidak akan datang.

Kekhawatiran ini makin menjadi, penampilan demi penampilan kian usai. Kini gilirananku, tapi masih saja aku belum mendapati keberadaan bapak.

Dengan langkah gontai, sedikit malas aku menaiki panggung dengan menggunakan atribut badut yang biasa kupakai ketika bekerja membantu bapak.

Aku bergerak kesana kemari memperagakan gayaku sama persis yang kulakukan saat berusaha menghibur orang lain di jalan. Melambai-lambai seolah-olah mengejar sesuatu yang tak terlihat, sementara tanganku bergerak-gerak dengan cepat membentuk berbagai bentuk yang lucu dan konyol di udara. Berjongkok dengan tiba-tiba, lalu dengan lincahnya meloncat kembali ke atas dan membuat gerakan eksentrik, yang rupanya mengundang gelak tawa penonton.

Sembari itu, mataku masih saja memantau pintu aula. Menanti kehadiran bapak. Aku melihat bapak, itu dia!

Cukup lama menampilkan penampilan yang kutahu disebut dengan teater gerak itu, alunan musik terdengar mengarahkan untuk menunjukkan penampilan berikutnya. Diikuti Instrumen lagu "Titip Rindu Buat Ayah" dari Ebiet G. Ade, aku mulai melepaskan topeng badut yang kugunakan sambil merogoh kertas di saku yang ingin kubacakan untuk bapak, sembari sesekali memastikan bahwa bapak masih ada di sana, menyaksikan aku.

"Untuk bapak tercinta.. Sedikit bercerita, Ikko dan bapak ini hidup berdua saja, kami ditinggal mama ketika Ikko menginjak umur 6 bulan. Namun, Ikko tidak pernah merasa kekurangan karena bapak. Hidup kami cukup-cukup saja. Bapak yang cinta akan pekerjaannya dan Ikko yang jatuh cinta dengan pekerjaan bapak," jelasku sambil memperhatikan dengan lekat wajah bapak yang nampak tersenyum kepadaku.

"Bapak adalah seorang badut. Kalau orang lain menganggap sebelah mata pekerjaan bapak, menganggap badut dengan pers-



Ilustrasi: Washilah - Andi Muh Saleh

pektif-perspektif negatif justru Ikko bangga dengan pekerjaan bapak. Badut bukan hanya penjual lelucon, tetapi mereka adalah seniman. Dengan gerakan-gerakan tubuh yang ekspresif, ekspresi wajah yang dramatis, dan kreativitas yang tak terbatas, badut menciptakan karya seni yang sama dengan seniman yang lainnya," sambungku disertai dengan nada yang sedikit bergetar.

Aku tak kuasa menahan tangisku, berbicara tentang bapak sedikit menguras perasaan.

"Hiks.. hiks..." suara tangisku terdengar melalui microphone yang ku gunakan.

"Bapak, teruslah hidup dan jadilah seniman yang abadi. Dari anak tersayangmu, Ambo Nyikko."

**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*



**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

Malan Lunglai Mona

Oleh: **Monica Ayu Lestari**

Heningan malam menjadi ranjau dalam seluk Kasur adalah bukti dalam setiap tetesan air mata Cermin adalah saksi dalam kehidupan dunia penuh dengan drama Apa yang diinginkan harus tercapai, membuat orang tua semakin beler dalam mencari uang

Terperangkap dalam sebuah kotak khayalan penuh imajinasi Seringkali suka dengan malam, namun tidak terima dengan kesepian dan heningnya malam Cinta dengan hujan, namun ketika hujan turun aku menggunakan payung dengan tergesa-gesa seakan-akan bahwa hujan membawa malapetaka

Aku Mona... Manusia yang seringkali bertemu dengan anca setiap harinya Keresahan ini tidak dapat diutarakan Hanya malam yang mengerti nestapaku Mungkin orang lain ketika lara, ia akan memilih untuk beristirahat

Sedangkan Mona tidak... Ia menemui malam untuk bercerita tentang sendu, rasa cemas, pikiran campur aduk berlarian tak tentu arah dan atma yang dibuat patah olehnya

Wacana Gedung PKM Yang Menanti Perbaikan

Washilah - Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN Alauddin Makassar semakin memprihatinkan. Sejak dioperasikan pada 2010, gedung ini hanya mendapat renovasi sekali, yaitu pada 2021 yang digumamkan langsung oleh Prof Darussalam dalam pelantikan Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat universitas. Wacana renovasi kembali mencuat dan direncanakan terealisasi pada 2025 sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum UIN Alauddin, Salman, Sabtu (13/12/2024).



Plang nama di sebelah kanan PKM, yang mengarah ke taman PLN ditumbuhi rumput liar. Temboknya juga berlumut akibat cat yang sudah lama tidak diperbarui. Logo pada plang pun masih menggunakan logo UIN yang lama.



Jalur di sisi kiri PKM menjadi ancaman bagi mahasiswa karena plafon yang rapuh berpotensi roboh dan membahayakan siapa saja yang melintas.



Cat tembok di depan teras PKM terkelupas menyebabkan lumut mudah tumbuh di bagian yang lembab pada tembok. Selain itu, tempat sampah hanya menggunakan karung bekas selama bertahun-tahun.



Water closet (WC) di lantai satu PKM tidak lagi berfungsi dan kini digunakan sebagai tempat penyimpanan alat pembersih.



Plafon ruangan PKM UKM Internasional Black Panther Karate Indonesia Unit UIN Alauddin di lantai dua roboh. Akibatnya, aktivitas hanya bisa dilakukan di teras ruangan. Padahal pada Mei 2024 pihak umum menjanjikan renovasi dalam waktu satu bulan, namun hingga Desember 2024 tidak ada tindak lanjut.



Pada 18 Desember 2024, mahasiswa yang sedang beraktivitas PKM dikejutkan oleh robohnya plafon di lantai dua, tepat di jalur tangga antara lantai satu dan lantai tiga. Mahasiswa yang menyaksikan kejadian tersebut meluapkan kekesalan mereka dengan merutuki bahwa hal itu mungkin terjadi karena uang palsu yang kemudian disetujui oleh mahasiswa lain.

Teks & Foto: Aa Min Abduh
Editor: Mahfud Al Qadri



END THE YEAR WITH A PERFECT SHOT

PLAY MORE, PAY LESS UNTIL YEAR-END!
#BILLIARDTANPAJUDI

50K / 2 HOURS
10.00 - 17.00
100K / 3 HOURS
17.00 - 02.00

Jl. Masjid Raya Syech Yusuf No.17
Sungguminasa Gowa

📱 coupsdebilliard 📞 0822-4930-8438



CARA MENGHADAPI PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN

Jangan diam, laporkan ke pihak yang berwenang

Mengonfrontasi langsung pelaku

Bersikap tegas bahwa kamu tidak nyaman

Ceritakan, pada orang terdekat

Bekali diri dengan pengetahuan bela diri

Meminta bantuan sekitar



Washilah Store

Menyediakan :

Salempang

Bucket

Jasa Foto

Jasa Makeup

Merchandise

📱 washilah.store 📞 0821 8756 4870

